



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 43);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 43) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 43
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- Pengertian Ringkas Tentang Renja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 point 30, dalam Peraturan Menteri ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah Dokumen resmi SKPD, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perubahan SKPD disusun oleh masing-masing bagian secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD, Propinsi dan APBN.

➤ Proses Penyusunan Renja Perubahan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut diawali dengan persiapan penyusunan Renja yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja Perubahan yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum yang merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perubahan. Proses penyusunan Renja perubahan diakhiri dengan penetapan Renja

perubahan, Penetapan rancangan akhir Renja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Sekretaris Daerah menetapkan Renja perubahan, untuk menjadi pedoman di lingkungan Sekretaris Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Sekretaris Daerah pada tahun berjalan.

Dalam penyusunan RENJA PERUBAHAN Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 ini, juga mempertimbangkan norma-norma pokok yang berlaku dan dijadikan pedoman, kebutuhan, aspirasi, permasalahan, serta potensi dan kondisi Kabupaten Garut. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
- b. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- c. Pendekatan politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah;
- d. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perubahan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja Perubahan SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

e. Renja Perubahan Tahun 2023 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan dan Mengacu Kepada Tema RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023.

- Keterkaitan Antara Renja Perubahan Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD.

Keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD Perubahan dan Renstra Perubahan SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen Daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKT, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD

- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,

Keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD Perubahan dan Renstra Perubahan SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perubahan SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen Daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

- keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja provinsi/Kabupaten/kota.

keterkaitan antara Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dengan Renja Perubahan Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat tersebut di atas, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa tantangan yang harus ditangani dengan baik untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat dalam tiga dimensi pembangunan yaitu;

1. Dimensi pembangunan manusia, yang meliputi :

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter;

2. Dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan :
Pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

Adapun keterkaitan Renja Perubahan antara SKPD dengan Renja Perubahan Provinsi Jawa Barat adalah Dimensi pembangunan manusia, yang meliputi : pendidikan, dan pembangunan mental /karakter.

➤ Tindak Lanjut Dengan Proses Penyusunan RAPBD.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan untuk tahun 2023 ini, Dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, diantaranya :

1. *Top-down*, yaitu :
pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. *Bottom-up*, yaitu :
pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Kegiatan tersebut Dilaksanakan dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Jawa Barat ;
3. Teknokratik, yaitu :
Pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan; Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman. Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 5 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

- 30 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
- 31 Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
- 32 Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

- Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.
- untuk mendokumentasikan program kerja, kegiatan, Sub Kegiatan serta sekaligus dijadikan target dan sasaran perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi target program, capaian kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung. Dan dengan mendapatkan pendanaan, pembiayaan dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan akan dijadikan cermin untuk tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan;
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023;
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah;
- e. Mendeskripsikan tentang seluruh program – program dan kegiatan yang sipatnya prioritas maupun yang biasa dilaksanakan secara rutin, tentunya seluruh program, kegiatan ini diharapkan akan menopang Visi, Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Garut juga mencapai target dan sasaran Sekretariat Daerah;
- f. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Tahunan.;
- g. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan seluruh kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023;
- h. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023;
- i. Menciptakan kepastian dan sinergitas Perencanaan Program kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- j. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
- k. Mendeskripsikan tentang program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan;
- l. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.

2.1 Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan (tahun n) dan mengacu pada APBD tahun berjalan yang Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat

Daerah dan/atau realisasi APBD semester 1 untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.3:

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah PPD Tahun 2023 yang di selaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran

strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, pagu perubahan renja tahun 2023. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Misalnya:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah, (Target dan Capaian sasaran IKU);
- b) Pencapaian SDGs, (Data Target dan Capaian SDGs);
- c) Pengentasan kemiskinan, (Data Penerima Program Kemiskinan);
- d) Pencapaian NSPK dan SPM, (Data Target dan Capaian SPM per urusan);
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,(Data potensi kecamatan/SKPD), (Data Pegawai, Data wilayah) Dsb;
- f) Pengembangan daerah terisolir, Dsb. (Rencana Pengembangan Wilayah), (Data Penanganan Stunting)

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1, yaitu sebagai berikut:

BAB IV. PENUTUP .

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daer

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

**PERBANDINGAN PAGU INDIKATIF DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM
RENSTRA SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019-2024
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		
		%	98	68.674.661.908	%	95	50.065.433.907	%	98	43.541.955.080			7.731.103.768			601	21.695.480.203	1475,00	1699,49	1524	71.550.115.085	
	PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD SESUAI KETENTUAN																					
	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																					
	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT STRUKTUR TEPAT FUNGSI																					
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	98	138.056.160	%	95	110.241.723	%	98	133.536.700			49.836.000		3.611.800	6	53.447.800	50	40,02	18	163.689.523	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	138.056.160	Bln	12	110.241.723	Dok	12	133.536.700	Dok	3	49.836.000	Dok	3	3.611.800	6	53.447.800	50	40,02	18	163.689.523
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentan	%	98	36.839.546.828	%	95	27.287.140.237	%	98	26.793.116.361			4.754.217.107	-	8.791.058.837	464	13.545.275.944	250	111,73	488	40.832.416.181	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)
		5			6			7			8				9				12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	229	36.277.713.904	Bln	12	27.062.035.087	Orang	229	26.592.529.717	Orang	229	4.733.032.407	Orang	229	8.689.367.037	458	13.422.399.444	200	50,47	470	40.484.434.531	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	561.832.924	Laporan	12	225.105.150	Laporan	12	200.586.644	Laporan	3	21.184.700	Laporan	3	101.691.800	6	122.876.500	50	61,26	18	347.981.650	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	98	1.388.462.213	%	95	1.241.407.860	%	98	1.337.977.680			205.036.230			366.981.640	6	572.017.870	50	42,75	19	1.813.425.730	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	1.337.977.680	Bln	12	1.221.796.460	Dok	12	1.337.977.680	Dok	3	205.036.230	Dok	3	366.981.640	6	572.017.870	50	42,75	18	1.793.814.330	
Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penyusunan dan Pelaporan Aset	Laporan	1	50.484.533	Laporan	1	19.611.400	Laporan	1	-			-			-	0	-	0	0,00	1	19.611.400	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	98	2.172.465.880	%	95	527.987.975	%	98	474.964.300			92.034.300			123.480.000	6	215.514.300	50	45,37	546	743.502.275	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dodot Pencak Silat Lokal			1.518.230.000	Stel	12	138.261.075			-			-			-	0	-	0	0	12	138.261.075	
	Jumlah Pengadaan Pakaian Adat	Stel	250		Stel	15		Stel	250								0	-	0	0	15	-	
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Stel	250		Buah	250		Stel	250								0	-	0	0	250	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)						
		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12						
	Jumlah Pakaian Olahraga	Stel	250		Buah	250		Stel	250					0	-	0	0	250	-			
	Pengadaan Pakaian Batik	Stel	250					Stel	250					0	-	0	0	0	-			
	Pengadaan Pakaian Hitam Putih	Stel	250					Stel	250					0	-	0	0	0	-			
	Pengadaan Pakaian PDH	Stel	55					Stel	55					0	-	0	0	0	-			
	Pengadaan Pakaian PDK	Stel	56					Stel	56					0	-	0	0	0	-			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	388.035.880	Bln	12	364.726.900	Laporan	12	474.964.300	Laporan	3	92.034.300	Laporan	3	123.480.000	6	215.514.300	50	45,37	18	580.241.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Bln	12	266.200.000	Paket	1	25.000.000	Bln	12	-			-			0	-	0	0	1	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	98	6.071.003.840	%	95	3.521.264.112	%	98	2.899.372.235			615.882.499			787.401.850	48	1.403.284.349	400	488,08	147	4.924.548.461
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	220.256.784	Gedung	15	33.879.697	Laporan	12	23.489.400	Laporan	3	-	Laporan	3	18.254.310	6	18.254.310	50	78	21	52.134.007
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Laporan	12	528.554.457	Bln	12	352.085.885	Laporan	12	168.003.300	Laporan	3	-	Laporan	3	86.309.830	6	86.309.830	50	51	18	438.395.715
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Laporan	12	104.306.453	Bln	12	85.863.500	Laporan	12	10.004.300	Laporan	3	10.004.300	Laporan	3	-	6	10.004.300	50	100	18	95.867.800

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)					
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)	
		3	4	5			6			7			8				9				12 = 8+9		13 = 12/7*100	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	12	698.961.292	Bln	12	586.779.638	Laporan	12	123.003.500	Laporan	3	50.267.550	Laporan	3	15.575.000	6	65.842.550	50	53,53	18	652.622.188		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Laporan	12	24.249.852	Bln	12	10.562.400	Laporan	12	10.159.200	Laporan	3	2.641.500	Laporan	3	2.641.500	6	5.283.000	50	52,00	18	15.845.400		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.430.618.960	Bln	12	1.315.007.500	Laporan	12	1.152.240.000	Laporan	3	344.640.000	Laporan	3	370.742.500	6	715.382.500	50	62,09	18	2.030.390.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.862.062.224	Bln	12	1.077.816.292	Laporan	12	1.356.166.135	Laporan	3	191.462.049	Laporan	3	278.823.210	6	470.285.259	50	34,68	18	1.548.101.551		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	12	201.993.818	Bln	12	59.269.200	Laporan	12	56.306.400	Laporan	3	16.867.100	Laporan	3	15.055.500	6	31.922.600	50	56,69	18	91.191.800		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	2.771.928.471	%	95	1.615.945.855	%	98	1.799.072.000			-			975.200.000	3	975.200.000,00	0	54	13	2.380.346.830		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	2.362.043.904	Unit	8	1.252.133.600	Unit	7	1.799.072.000	Unit	0	-	Unit	3	975.200.000	3	975.200.000	0	54	11	2.227.333.600		
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel/air sesuai dengan Kebutuhan	Paket	1	310.697.067	Paket	2	153.013.230	Paket	1	-			-			0	-	0	0	2	153.013.230			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)					
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)	
		3	4	5			6			7			8				9				12 = 8+9		13 = 12/7*100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	99.187.500	Paket	2	210.799.025	Unit	2	-														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	4.835.683.167	%	95	2.007.601.025	%	98	2.158.588.221			551.386.263			495.569.268	18	1.046.955.531	150	137,32	105	3.054.556.556		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	257.405.052	Bln	12	199.206.705	Laporan	12	117.518.500	Laporan	3	32.425.000	Laporan	3	11.060.000	6	43.485.000	50	37,00	18	242.691.705		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.981.586.268	Lokasi	4	1.092.163.180	Laporan	12	1.344.968.071	Laporan	3	310.602.354	Laporan	3	322.001.143	6	632.603.497	50	47,03	10	1.724.766.677		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Flashdisk, AC Split, Genset, Komputer/ Notebook, Printer	Unit	43	1.583.490.913	Unit	67	53.550.800	Unit	40	-			-			-	0	-	0	0	67	53.550.800		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.013.200.934	Lokasi	4	662.680.340	Laporan	12	696.101.650	Laporan	3	208.358.909	Laporan	3	162.508.125	6	370.867.034	50	53	10	1.033.547.374		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%	98	2.474.339.234	%	95	6.102.948.267	%	98	1.041.766.770			59.049.591			599.205.710	12	658.255.301	100	143,27	26	6.761.203.568		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)			
											I		II									
		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			
3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan	12	867.747.795	Bln	12	401.066.100	Laporan	12	240.950.000	Laporan	3	59.049.591	Laporan	3	45.211.760	6	104.261.351	50	43,27	18	505.327.451
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Laporan	12	1.606.591.439	Gedung	2	5.701.882.167	Laporan	12	553.993.950	Laporan	3	-	Laporan	3	553.993.950	6	553.993.950	50	100,00	8	6.255.876.117
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Gedung	2	246.822.820				Gedung	0							
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	%	98	2.520.540.188	%	95	1.031.979.102	%	98	2.010.011.581			228.895.011		564.682.228	14	793.577.239	225	135,79	91	1.825.556.341	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	1.859.290.188	Bln	12	899.674.702	Orang	2	1.776.557.781	Orang	2	228.895.011	Orang	0	458.232.228	2	687.127.239	100	38,68	14	1.586.801.941
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	423.200.000	Stel	36	107.364.400	Paket	8	109.613.800	Paket	0	-	Paket	6	106.450.000	6	106.450.000	75	97,11	42	213.814.400

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)			
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)		
		5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12						
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	238.050.000	Orang	29	24.940.000	Laporan	12	123.840.000	Laporan	3	-	Laporan	3	-	6	-	50	0,00	35	24.940.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	%	98	2.805.097.238	%	95	1.957.836.000	%	98	2.095.791.100			429.095.400			491.265.900	18	920.361.300	150	126	54	2.878.197.300
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Laporan	12	1.667.275.190	Bln	12	1.175.624.000	Laporan	12	1.224.528.250	Laporan	3	297.521.300	Laporan	3	253.811.150	6	551.332.450	50	45,02	18	1.726.956.450
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Laporan	12	961.096.224	Bln	12	661.070.200	Laporan	12	748.862.850	Laporan	3	128.064.100	Laporan	3	194.941.750	6	323.005.850	50	43,13	18	984.076.050
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Laporan	12	176.725.824	Bln	12	121.141.800	Laporan	12	122.400.000	Laporan	3	3.510.000	Laporan	3	42.513.000	6	46.023.000	50	37,60	18	167.164.800
Penataan Organisasi	Indeks Pelayanan Publik	%	98	1.942.478.618	%	95	1.171.395.172	%	98	467.228.000			139.995.200			194.733.600	0	334.728.800	0	218,56	8	1.506.123.972
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dok	1	485.116.558	Draft Peraturan	2	331.992.382	Dok	1	194.209.000	Dok	0	99.500.900	Dok	0	56.121.000	0	155.621.900	0	0	2	487.614.282
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	1	471.145.619	Laporan	2	361.821.590	Dok	1	71.464.800	Dok	0		Dok	0	31.295.500	0	31.295.500	0	0,00	2	393.117.090

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)			
											I		II									
		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			
3	4	5			6			7			8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dok	1	297.397.224	Draft	2	184.278.400	Dok	1	81.053.200	Dok	0	12.057.000	Dok	0	48.788.800	0	60.845.800	0	75,07	2	245.124.200
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	1	431.299.878	Laporan	1	244.925.200	Dok	1	77.659.200	Dok	0	16.628.500	Dok	0	40.229.100	0	56.857.600	0	73,21	1	301.782.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok	1	257.519.339	Draft Lap	1	48.377.600	Dok	1	42.841.800	Dok	0	11.808.800	Dok	0	18.299.200	-	30.108.000	0	70	1	78.485.600
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	98	4.715.060.071	%	95	3.489.686.579	%	98	2.330.530.132			605.676.167			571.185.602	6	1.176.861.769	50	157	9	4.666.548.348
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1.502.398.194	Laporan	1	1.367.146.650	Laporan	12	714.169.072	Laporan	3	185.255.300	Laporan	3	162.715.400	6	347.970.700	50	48,72	7	1.715.117.350
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	710.456.413	Laporan	1	521.364.881	Laporan	1	372.849.800	Laporan	0	129.928.800	Laporan	0	89.726.550	-	219.655.350	0	58,91	1	741.020.231
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	1	2.502.205.464	Laporan	1	1.601.175.048	Laporan	1	1.243.511.260	Laporan	0	290.492.067	Laporan	0	318.743.652	-	609.235.719	0	48,99	1	2.210.410.767

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)						
		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											
3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	%	98	133.737.783.43 7	%	95	39.401.789.00 9	%	98	37.557.404.48 4			13.692.222.45 1			195	25.979.617.851	50,65	571,96	528,0 0	65.381.406.86 0	
	Persentase koordinasi Pemerintahan																					
	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji																					
	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi																					
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan	%	98	5.452.632.003	%	95	1.193.060.900	%	98	278.971.940			77.439.300			57.411.800	0	134.851.100	0	141,90	3	1.327.912.000
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	1	3.419.540.296	Dok	1	315.522.000	Dok	1	86.604.175	Dok	0	1.036.000	Dok	0	18.277.000	0	19.313.000	0	22,30	1	334.835.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Dok	1	646.431.852	Dok	1	573.743.400	Dok	1	97.487.840	Dok	0	70.607.800	Dok	0	6.353.700	0	76.961.500	0	78,94	1	650.704.900
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	1	1.386.659.855	Dok	1	303.795.500	Dok	1	94.879.925	Dok	0	5.795.500	Dok	0	32.781.100	0	38.576.600	0	40,66	1	342.372.100
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan	%	98	124.573.555.56 8	%	95	35.721.660.71 8	%	98	35.755.562.82 1			12.724.715.72 1			12.096.146.50 0	0	24.820.862.221	0	141,35	202	60.542.522.93 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)
		5			6			7			8				9				12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	1	118.141.556.000	Dok	1	33.829.361.288	Dok	1	33.670.888.021	Dok	0	12.695.574.121	Dok	0	11.713.604.000	0	24.409.178.121	0	72,49	1	58.238.539.409	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dok	1	6.000.000.000	Orang	200	1.748.673.830	Dok	1	2.055.708.800	Dok	0	20.057.800	Dok	0	377.280.000	0	397.337.800	0	19,33	200	2.146.011.630	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dok	1	431.999.568	Laporan	1	143.625.600	Dok	1	28.966.000	Dok	0	9.083.800	Dok	0	5.262.500	0	14.346.300	0	49,53	1	157.971.900	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	%	98	2.784.048.828	%	95	1.356.472.781	%	98	579.912.100			143.465.000			77.880.000	195	221.345.000	51	119,12	315	1.577.817.781	
Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Perda	6	785.810.784	Perda	9	281.687.000	Perda	6	168.432.000	Perda	0	38.805.000	Perda	0	35.887.500	0	74.692.500	0	44,35	9	356.379.500	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan	1	1.417.382.868	Laporan	1	388.175.000	Laporan	1	286.264.800	Laporan	0	73.495.000	Laporan	0	20.750.000	0	94.245.000	0	32,92	1	482.420.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Buku	385	580.855.176	Anggota	110	686.610.781	Buku	385	125.215.300	Buku	170	31.165.000	Buku	25	21.242.500	195	52.407.500	51	41,85	305	739.018.281	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	%	98	927.547.038	%	95	1.130.594.610	%	98	942.957.623			746.602.430			55.957.100	0	802.559.530	0	169,59	8	1.933.154.140	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)
		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dok	1	313.780.685	Naskah	6	194.304.000	Dok	1	103.352.508	Dok	0	10.852.700	Dok	0	34.009.800	0	44.862.500	0	43,41	6	239.166.500	
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dok	1	363.436.326	Dok	1	789.269.310	Dok	1	765.069.500	Dok	0	727.134.130	Dok	0	8.147.500	0	735.281.630	0	96,11	1	1.524.550.940	
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	250.330.027	Dokumen Evaluasi	1	147.021.300	Laporan	1	74.535.615	Laporan	0	8.615.600	Laporan	0	13.799.800	0	22.415.400	0	30,07	1	169.436.700	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	%	98	5.950.445.697	%	95	4.205.967.673	%	98	1.962.488.975			326.813.949				7	951.642.374	215	513,87	162	5.157.610.047	
	Persentase kualitas pengendalian pembangunan																						
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu																						
	Persentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah																						
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	%	98	831.133.148	%	95	1.340.468.151	%	98	379.590.200			51.114.500			124.472.600	1	175.587.100	50	133,02	5	1.516.055.251	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)							
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)			
		3		4		5			6			7			8				9				12 = 8+9		13 = 12/7*100	
Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dok	2	211.481.500	Laporan	2	601.852.851	Dok	2	211.481.500	Dok	0	11.016.400	Dok	1	93.054.000	1	104.070.400	50	49,21	3	705.923.251				
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	460.035.466	Laporan	1	634.511.100	Laporan	1	111.381.700	Laporan	0	24.083.100	Laporan	0	24.777.100	0	48.860.200	0	43,87	1	683.371.300				
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	159.616.182	Laporan	1	104.104.200	Laporan	1	56.727.000	Laporan	0	16.015.000	Laporan	0	6.641.500	0	22.656.500	0	39,94	1	126.760.700				
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	98	1.296.269.515	%	95	1.187.919.600	%	98	447.937.575			93.618.500			141.561.740	0	235.180.240	0	151,64	3	1.423.099.840				
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dok	1	508.200.000	Laporan	1	588.536.800	Dok	1	267.397.600	Dok	0	22.895.800	Dok	0	120.308.640	0	143.204.440	0	53,55	1	731.741.240				
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	435.600.000	Laporan	1	339.094.100	Laporan	1	122.278.475	Laporan	0	58.030.800	Laporan	0	8.501.100	0	66.531.900	0	54,41	1	405.626.000				
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	352.469.515	Aplikasi	1	260.288.700	Laporan	1	58.261.500	Laporan	0	12.691.900	Laporan	0	12.752.000	0	25.443.900	0	43,67	1	285.732.600				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)
		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	%	98	3.326.082.131	%	95	1.314.692.422	%	98	541.526.600			130.709.749			151.643.885	2	282.353.634	40	100,32	143	1.597.046.056	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	5	1.988.352.752	Laporan	5	865.879.772	Laporan	5	354.769.600	Laporan	1	90.906.600	Laporan	1	151.643.885	2	242.550.485	40	68,37	7	1.108.430.257	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dok	1	583.823.028	Aplikasi, Laporan	1	100.958.750	Dok	1	24.314.000	Dok	0	2.130.000	Dok	0	-	0	2.130.000	0	8,76	1	103.088.750	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	753.906.351	PPK	135	347.853.900	Orang	150	162.443.000	Orang	0	37.673.149	Orang	0	-	0	37.673.149	0	23,19	135	385.527.049	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumberdaya alam yang dievaluasi	%	98	496.960.903	%	95	362.887.500	%	98	593.434.600			51.371.200			207.150.200	4	258.521.400	125	128,89	11	621.408.900	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Laporan	4	227.381.675	Laporan	4	221.213.200	Laporan	4	471.943.800	Dok	1	24.641.800	Dok	2	182.904.700	3	207.546.500	75	43,98	7	428.759.700	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja.3 PD Tahun 2023 (%).3		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023)				
		K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	K		Rp. (000)	I		II		K		Rp. (000)	K		Rp.	K		Rp. (000)
		3		4		5		6		7		8		9		12 = 8+9		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12			
Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Laporan	2	130.429.228	Laporan	2	54.974.400	Laporan	2	52.225.600	Dok	0	12.628.700	Dok	1	11.410.200	1	24.038.900	50	46,03	3	79.013.300	
Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan	1	139.150.000	Laporan	1	86.699.900	Laporan	1	69.265.200	Dok	0	14.100.700	Dok	0	12.835.300	0	26.936.000	0	38,89	1	113.635.900	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		153,50	327,44				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Sumber : data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023.

Tabel 2.2

**Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

No	Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	6315,86	3016,56
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150	118,57
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150	118,57
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	355	173,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	205	111,60
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	150	61,94
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250	172,92
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150	134,07
	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	100	38,85
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264,33	168,03
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150	149,53
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8	9,39
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1225,00	569,05
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	175	23,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150	82,94

No	Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150	91,91
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150	93,37
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150	65,34
	Fasilitas Kunjungan Tamu	150	83,53
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	83,14
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150	45,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357	143,55
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157	94
	Pengadaan Mebel	200	49
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472	286,71
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	94,28
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83	87,04
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156	3,38
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83	102,01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	217	447,62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150	58,23
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67	389,39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1516,67	146,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	700	85,34
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	525	50,52
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	292	10,48
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	450	300,56
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	150	103,58
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	150	102,39
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	150	94,59
	Penataan Organisasi	800	182,87
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	200	0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200	0
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200	82,42
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	69,97
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	30,48
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	258	306,80
	Fasilitasi Keprotokolan	58	114,16
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100	104,30

No	Urusan dan Program	Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	88,34
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21629,22	899,55
	Administrasi Tata Pemerintahan	300,00	135,14
	Penataan Administrasi Pemerintahan	100	9,79
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	100,66
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	24,69
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	20.200	121,63
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100	49,30
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	20000	35,77
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	36,57
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	329,22	79,39
	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	150	45,35
	Fasilitasi Bantuan Hukum	100	34,04
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	79	0
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	800	563,39
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	600	76,22
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	100	419,48
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	100	67,69
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1305	1.335,28
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	350	561,76
	Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	150	333,80
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100	148,55
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	79,42
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	300	318,17
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100	143,99
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	93,12
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	100	81,07
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230	124,54
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	140	55,75
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	0	17,66
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90	51,14
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	425	330,81
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	175	188,56
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	150	60,58
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	100	81,66
	Jumlah	68	56

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

**PERBANDINGAN PAGU INDIKATIF DAN REALISASI ANGGARAN
RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023**

No	Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi Terhadap Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	43.541.955.080	1699,49	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.536.700	40,02	3.611.800
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.536.700	40,02	3.611.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.793.116.361	111,73	8.791.058.837
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.592.529.717	50,47	8.689.367.037
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	200.586.644	61,26	101.691.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.337.977.680	42,75	366.981.640
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.337.977.680	42,75	366.981.640
	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	-	0,00	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	474.964.300	45,37	123.480.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	0	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	474.964.300	45,37	123.480.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.899.372.235	488,08	787.401.850

No	Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi Terhadap Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	23.489.400	78	18.254.310
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.003.300	51	86.309.830
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.004.300	100	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.003.500	53,53	15.575.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.159.200	52,00	2.641.500
	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.152.240.000	62,09	370.742.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.356.166.135	34,68	278.823.210
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.306.400	56,69	15.055.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.799.072.000	54	975.200.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.799.072.000	54	975.200.000
	Pengadaan Mebel	-	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.158.588.221	137,32	495.569.268
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.518.500	37,00	11.060.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.968.071	47,03	322.001.143
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.101.650	53	162.508.125
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.041.766.770	143,27	599.205.710
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.950.000	43,27	45.211.760
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	553.993.950	100,00	553.993.950
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.822.820		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.010.011.581	135,79	564.682.228
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.776.557.781	38,68	458.232.228
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.613.800	97,11	106.450.000

No	Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi Terhadap Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4	5
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	123.840.000	0,00	-
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.095.791.100	126	491.265.900
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.224.528.250	45,02	253.811.150
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	748.862.850	43,13	194.941.750
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	122.400.000	37,60	42.513.000
	Penataan Organisasi	467.228.000	218,56	194.733.600
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	194.209.000	0	56.121.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	71.464.800	0,00	31.295.500
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	81.053.200	75,07	48.788.800
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	77.659.200	73,21	40.229.100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	42.841.800	70	18.299.200
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.330.530.132	157	571.185.602
	Fasilitasi Keprotokolan	714.169.072	48,72	162.715.400
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	372.849.800	58,91	89.726.550
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.243.511.260	48,99	318.743.652
	Rata-rata capaian kinerja (%)		141,62	
	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.557.404.484	571,96	
	Administrasi Tata Pemerintahan	278.971.940	141,90	57.411.800
	Penataan Administrasi Pemerintahan	86.604.175	22,30	18.277.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	97.487.840	78,94	6.353.700
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	94.879.925	40,66	32.781.100
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	35.755.562.821	141,35	12.096.146.500
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	33.670.888.021	72,49	11.713.604.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.055.708.800	19,33	377.280.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	28.966.000	49,53	5.262.500
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	579.912.100	119,12	77.880.000
	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	168.432.000	44,35	35.887.500

No	Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi Terhadap Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Bantuan Hukum	286.264.800	32,92	20.750.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	125.215.300	41,85	21.242.500
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	942.957.623	169,59	55.957.100
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	103.352.508	43,41	34.009.800
	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	765.069.500	96,11	8.147.500
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	74.535.615	30,07	13.799.800
	Rata-rata capaian kinerja (%)		142,99	
	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.962.488.975	513,87	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	379.590.200	133,02	124.472.600
	Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	211.481.500	49,21	93.054.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.381.700	43,87	24.777.100
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.727.000	39,94	6.641.500
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	447.937.575	151,64	141.561.740
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	267.397.600	53,55	120.308.640
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.278.475	54,41	8.501.100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	58.261.500	43,67	12.752.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	541.526.600	100,32	151.643.885
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	354.769.600	68,37	151.643.885
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	24.314.000	8,76	-
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	162.443.000	23,19	-
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	593.434.600	128,89	207.150.200
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	471.943.800	43,98	182.904.700
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	52.225.600	46,03	11.410.200
	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	69.265.200	38,89	12.835.300
	Rata-rata capaian kinerja (%)		128,47	
			Sangat Tinggi	
	Predikat kinerja		327,44	
			Sangat Tinggi	

No	Nama Urusan dan Program	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	% Realisasi Terhadap Renja	Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4	5
	Jumlah	68.626.740.428		48.626.740.428

Sumber : LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 48,63%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 56,37% untuk target kinerja, dan 68,64% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4

**RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA
DAN ANGGARAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023.**

No	Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4
4.01.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45,24	49,83
4.01.01.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	40,02

No	Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
4.01.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	40,02
4.01.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	50,56
4.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	50,47
4.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50	61,26
4.01.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50	42,75
4.01.01.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50	42,75
4.01.01.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	45,37
4.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50	45,37
4.01.01.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	48,40
4.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50	77,71
4.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	51,37
4.01.01.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50	100
4.01.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	53,53
4.01.01.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	52
4.01.01.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	62,09
4.01.01.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	34,68
4.01.01.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	56,69
4.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,86	54,21
4.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,86	54,21
4.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	48,50
4.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	37,00
4.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	47,03
4.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	53,28
4.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33	63,19
4.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	43,27
4.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50	100
4.01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0
4.01.01.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75	39,48
4.01.01.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	38,68
4.01.01.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75	97,11
4.01.01.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50	0
4.01.01.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	50	43,91

No	Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
4.01.01.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	50	45,02
4.01.01.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	50	43,13
4.01.01.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	50	37,60
4.01.01.13	Penataan Organisasi	0	71,64
4.01.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0	80,13
4.01.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	43,79
4.01.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0	75,07
4.01.01.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	73,21
4.01.01.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	70,28
4.01.01.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	16,67	50,50
4.01.01.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	50	48,72
4.01.01.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	58,91
4.01.01.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0	48,99
4.01.02	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6,33	69,17
4.01.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	0	48,34
4.01.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	0	22,30
4.01.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0	78,94
4.01.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0	40,66
4.01.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0	69,42
4.01.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0	72,49
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	0	19,33
4.01.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	0	49,53
4.01.02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	25,32	38,17
4.01.02.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	0	44,35
4.01.02.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	0	32,92
4.01.02.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	50,65	41,85
4.01.02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	0	85,11
4.01.02.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0	43,41
4.01.02.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	96,11
4.01.02.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	30,07
4.01.03	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	16	48,49
4.01.03.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	16,67	46,26
4.01.03.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50	49,21

No	Urusan dan Bidang Program	Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%)	
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
4.01.03.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0	43,87
4.01.03.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0	39,94
4.01.03.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	0	52,50
4.01.03.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	0	53,55
4.01.03.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0	54,41
4.01.03.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0	43,67
4.01.03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13	52,14
4.01.03.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40	68,37
4.01.03.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0	8,76
4.01.03.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	23,19
4.01.03.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	33,33	43,56
4.01.03.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50	43,98
4.01.03.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	50	46,03
4.01.03.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	0	38,89
	JUMLAH	68.64	56,37

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
KABUPATEN GARUT**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			%	95	91.769.945.848		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	
40101		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA SKPD SESUAI KETENTUAN	%	95	91.769.945.848		Persen	90	100	90	49	50
40101	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	95	138.056.160		Persen	95	100	98	49	50
40101	01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan SKPD	Dok	8	138.056.160	Dok	Bulan	12	100	12	6	50
40101	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas keuangan, pelayanan umum	%	95	36.839.006.828	%	Persen	95	100	98	74	75
40101	02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bln	12	36.277.173.904	Bln	Bulan	12	100	229	229	100
40101	02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Lap	6	561.832.924	Lap	Laporan	12	100	12	6	50
40101	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	95	1.740.537.495	%	Persen	95	100	98	49	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
40101	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bln	12	1.690.052.962	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	03	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	50.484.533	Lap	Laporan	1	100	1	1	50
40101	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	95	1.494.307.130	%	Persen	95	100	98	49	50
40101	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Adat			759.115.000		Stel	15	100	0	0	0
40101	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bln	12	388.035.880	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Paket	0		Paket	Paket	1	100	0	0	0
40101	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95	20.925.148.354	%	Persen	90	100	98	49	50
40101	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1.033.616.630	Paket	Paket	15	100	12	6	50
40101	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Memadai	%	90	6.499.005.448	%	Bulan	12	100	12	6	50
40101	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan Rumah Tangga yang Memadai	Bln	12	2.137.000.000	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan	Bln	12	2.256.444.960	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah sesuai Kebutuhan	Bln	12	490.000.000	Bln	Bulan	12	100	12	6	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
40101	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minum untuk memfasilitasi kegiatan Internal Sekretariat Daerah	Bln	12	2.430.618.960	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bln	12	1.862.062.224	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang diperbaharui	Bln	12	201.993.818	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	70	826.181.205	%	Persen	97	100	98	42	42,86
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,	Unit			Unit	Unit	2	100	7	3	42,86
40101	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair sesuai Kebutuhan	Paket	1	826.181.205	Paket	Paket	2	100	0	0	0
40101	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0		Paket	Paket	2	100	12	6	50
40101	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	95	16.495.559.885	%	Persen	95	100	98	49	50
40101	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Bln	12	148.500.000	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Langganan Telepon, Listrik dan Air	Bln	12	8.834.853.503	Bln	Lokasi	4	100	12	6	50
40101	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Jenis	90	6.499.005.448	Jenis	Unit	67	100	12	6	50
40101	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksanaan outsourcing kebersihan	Lokasi	5	1.013.200.934	Lokasi	Lokasi	4	100	12	6	50
40101	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	95	2.474.339.234	%	Persen	95	100	98	33	33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	
40101	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bln	12	867.747.795	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	20	1.606.591.439	Gedung	Gedung,	1	100	12	6	50
40101	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	95	1.859.290.188	%	Persen	95	100	98	74	75
40101	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bln	12	1.859.290.188	Bln	Bulan	12	100	2	2	100
40101	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Stel	0		Stel	Stel	36	100	8	6	75
40101	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	0		Orang	Orang	2	100	12	6	50
40101	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	2.805.097.238	%	Persen	95	100	98	49	50
40101	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bln	12	1.667.275.190	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bln	12	961.096.224	Bln	Bulan	12	100	12	6	50
40101	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Bln	12	176.725.824	Bln	Bulan	12	100	12	6	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			%	95	1.457.362.060		%	Persen	95		100	98	0	0
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)								
40101	13		Penataan Organisasi	Indeks Pelayanan Publik	%	95	1.457.362.060	%	Persen	95	100	98	0	0
40101	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Peraturan	5	481.145.619	Peraturan	Draft Peraturan	2	100	1	0	0
40101	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	UPT, SKPD	56, 42	471.145.619	UPT, SKPD	UPT	60	100	1	0	0
40101	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Baik	78	297.397.224	Baik	Kajian	78	100	1	0	0
40101	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Lap	1	431.299.878	Lap	Laporan	1	100	1	0	0
40101	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	Lap	1	257.519.339	Lap	Draft Laporan	1	100	1	0	0
40101	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.715.060.071	%		100	100	98	16	16,67
40101	14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Orang	50	1.502.398.194	Orang	Orang	50	100	12	6	50
40101	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan informasi dan kebijakan yang terpublikasikan	Lap	1	710.456.413	Lap	Laporan	1	100	1	0	0
40101	14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bln	12		Bln	Bulan	12	100	1	0	0
40102			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE IMPLEMENTASI BAHAN KEBIJAKAN LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			32.792.492.921		Persen	98	100	98	49	50
				PROSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	%	20		%	Persen	98	100	98		
				PROSENTASE PRODUK RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG DIKAJI					Persen	80	100	80		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			Persen	95	1.120.623.500		%	Persen	95		100	98	0	0
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
40102	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Persen	95	1.120.623.500	%	Persen	95	100	98	0	0
40102	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	1	3.419.540.296	Dok	Dokumen	1	100	1	0	0
40102	01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Wilayah Administrasi	Kec	42	208.230.800	Kec	Kec	1	100	1	0	0
40102	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	1	282.584.700	Dok	Dokumen	1	100	1	0	0
40102	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan	%	95	29.895.996.100	%	%	95	100	1	0	0
40102	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Lembaga	100	27.994.423.300	Lembaga	Lembaga	1	100	1	0	0
40102	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Lap	1	6.000.000.000	Lap	Lap	1	100	1	0	0
40102	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup kesejahteraan Masyarakat	Lap	1	152.731.800	Lap	Lap	1	100	1	0	0
40102	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	Persen	90	1.353.975.500		Persen	90	100	98	25	25,32
40102	03	01	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Perda	9	394.600.000	Perda	Perda	9	100	1	0	0
40102	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Wil. Kec	20	637.800.000	Wil. Kec	Wil. Kec	20	100	1	0	0
40102	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Anggota	110	321.575.500	Anggota	Anggota	110	100	385	195	50,65
40102	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	Persen	95	421.897.821	%	Persen		100	98	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11			
40102	04	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Naskah	6	237.997.000	Naskah	Naskah	1	100	1	0	0	
40102	04	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dok	1	34.426.900	Dok	Dokumen	1	100	1	0	0	
40102	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dok Evaluasi	1	149.473.921	Dok Evaluasi	Dok Evaluasi	1	100	1	0	0	
40103			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengendalian perkembangan usaha BUMD							100	98	11	12	
				Persentase kualitas pengendalian pembangunan								100	98	34	35
				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	Persen	100	3,427,477,059	%	%			100	90	49	50
				Persentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	Persen	80		%	%			100	98	0	0
40103	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	Persen	95	804,065,000	%	Persen		100	98	0		
40103	01	01	Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Lap	2	304.180.700	Lap	Lap	1	100	2	1	50	
40103	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Lap	1	390.155.000	Lap	Lap	1	100	1	0	0	
40103	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Lap	1	109.729.300	Lap	Lap	1	100	1	0	0	
40103	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,007,442,469		Persen	90	100	98	0	0	
40103	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Keg	1	517.625.500	Keg	Keg	1	100	1	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		
40103	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Paket	1	217.979.369	Paket	Paket	1	100	1	0	0
40103	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Pemeliharaan Aplikasi DIPDA	Aplikasi	1	271.837.600	Aplikasi	Aplikasi	1	100	1	0	0
40103	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Persen	95	1,332,621,090	%	Persen	95	100	98	13	13
40103	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Laporan	5	795.480.290	Org	Laporan	5	100	5	2	40
40103	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			117.167.500		Dok	1	100	1	0	0
40103	03	02	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	0	419.973.300	Orang	Orang	15	100	150	0	0
40103	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumberdaya alam yang dievaluasi	Persen	95	283,348,500	%	Persen	95	100	98	33	33,33
40103	04	01	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Lap	4	141.674.200	Lap	Lap	4	100	4	2	50
40103	04	02	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil koordinasi lingkup pertambangan dan lingkungan hidup	Lap	2	54.974.400	Lap	Lap	1	100	2	1	50
40103	04	03	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan hasil kebijakan pertambangan. lingkungan hidup, energi dan air	Lap	1	86.699.900	Lap	Lap	1	100	1	0	0

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp83.061.848.539,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp48.626.740.428 ,00 atau mencapai 58,54%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.6

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.01.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.541.955.080	21.695.480.203	49,83
4.01.01.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.536.700	53.447.800	40,02
4.01.01.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.536.700	53.447.800	40,02
4.01.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.793.116.361	13.545.275.944	50,56
4.01.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.592.529.717	13.422.399.444	50,47
4.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.586.644	122.876.500	61,26
4.01.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.337.977.680	572.017.870	42,75
4.01.01.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.337.977.680	572.017.870	42,75
4.01.01.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	474.964.300	215.514.300	45,37
4.01.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	474.964.300	215.514.300	45,37
4.01.01.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.899.372.235	1.403.284.349	48,40
4.01.01.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.489.400	18.254.310	77,71
4.01.01.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.003.300	86.309.830	51,37
4.01.01.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.004.300	10.004.300	100
4.01.01.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.003.500	65.842.550	53,53
4.01.01.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.159.200	5.283.000	52
4.01.01.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.152.240.000	715.382.500	62,09
4.01.01.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.356.166.135	470.285.259	34,68
4.01.01.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.306.400	31.922.600	56,69
4.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.799.072.000	975.200.000	54,21
4.01.01.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.799.072.000	975.200.000	54,21
4.01.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.158.588.221	1.046.955.531	48,50
4.01.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.518.500	43.485.000	37,00
4.01.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.968.071	632.603.497	47,03
4.01.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.101.650	370.867.034	53,28
4.01.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.041.766.770	658.255.301	63,19

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.01.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.950.000	104.261.351	43,27
4.01.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	553.993.950	553.993.950	100
4.01.01.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.822.820	-	0
4.01.01.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.010.011.581	793.577.239	39,48
4.01.01.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.776.557.781	687.127.239	38,68
4.01.01.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.613.800	106.450.000	97,11
4.01.01.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	123.840.000	-	0
4.01.01.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.095.791.100	920.361.300	43,91
4.01.01.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.224.528.250	551.332.450	45,02
4.01.01.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	748.862.850	323.005.850	43,13
4.01.01.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	122.400.000	46.023.000	37,60
4.01.01.13	Penataan Organisasi	467.228.000	334.728.800	71,64
4.01.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	194.209.000	155.621.900	80,13
4.01.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	71.464.800	31.295.500	43,79
4.01.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	81.053.200	60.845.800	75,07
4.01.01.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	77.659.200	56.857.600	73,21
4.01.01.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	42.841.800	30.108.000	70,28
4.01.01.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.330.530.132	1.176.861.769	50,50
4.01.01.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	714.169.072	347.970.700	48,72
4.01.01.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	372.849.800	219.655.350	58,91
4.01.01.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.243.511.260	609.235.719	48,99
4.01.02	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	37.557.404.484	25.979.617.851	69,17
4.01.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	278.971.940	134.851.100	48,34
4.01.02.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	86.604.175	19.313.000	22,30
4.01.02.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	97.487.840	76.961.500	78,94
4.01.02.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	94.879.925	38.576.600	40,66
4.01.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	35.755.562.821	24.820.862.221	69,42
4.01.02.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	33.670.888.021	24.409.178.121	72,49
4.01.02.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.055.708.800	397.337.800	19,33
4.01.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	28.966.000	14.346.300	49,53
4.01.02.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	579.912.100	221.345.000	38,17
4.01.02.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	168.432.000	74.692.500	44,35
4.01.02.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	286.264.800	94.245.000	32,92
4.01.02.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	125.215.300	52.407.500	41,85
4.01.02.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	942.957.623	802.559.530	85,11
4.01.02.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	103.352.508	44.862.500	43,41
4.01.02.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	765.069.500	735.281.630	96,11
4.01.02.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	74.535.615	22.415.400	30,07

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.01.03	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.962.488.975	951.642.374	48,49
4.01.03.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	379.590.200	175.587.100	46,26
4.01.03.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	211.481.500	104.070.400	49,21
4.01.03.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.381.700	48.860.200	43,87
4.01.03.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.727.000	22.656.500	39,94
4.01.03.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	447.937.575	235.180.240	52,50
4.01.03.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	267.397.600	143.204.440	53,55
4.01.03.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.278.475	66.531.900	54,41
4.01.03.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	58.261.500	25.443.900	43,67
4.01.03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	541.526.600	282.353.634	52,14
4.01.03.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	354.769.600	242.550.485	68,37
4.01.03.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	24.314.000	2.130.000	8,76
4.01.03.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	162.443.000	37.673.149	23,19
4.01.03.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	593.434.600	258.521.400	43,56
4.01.03.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	471.943.800	207.546.500	43,98
4.01.03.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	52.225.600	24.038.900	46,03
4.01.03.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	69.265.200	26.936.000	38,89
	JUMLAH	83.061.848.539	48.626.740.428	58,54

Sumber LRA tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 6 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan Masih dalam Proses Penyelesaian Pekerjaan Selain itu, terdapat 8 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sesuai dengan anggaran Kas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan aktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pada Tahun 2023 (TW II) berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada Sekretariat Daerah Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 1) Adanya tuntutan Reformasi Birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja pegawai dan profesionalisme pegawai;
- 2) Adanya perkembangan kebijakan Pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 3) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan sebagai simpul pelayanan publik, sehingga menuntut peningkatan kapasitas Pemerintahan.
- 4) Makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan prima di bidang kepegawaian sebagai perwujudan *good governance* dan bebas KKN;
- 5) Adanya tuntutan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energy sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.
- 6) Menata produk hukum Daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan Akuntabilitas Kinerja
- 8) Tuntutan dalam meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan,
- 9) Meningkatkan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), membina BUMD serta mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama.

10) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan SDA/LH.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2023 TW II**

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSEN TASE PEMENUHAN PERENCANA AN KINERJA SKPD SESUAI KETENTUAN	%	98	68.674.661.908	%	95	50.065.433.907	%	98	43.541.955.080			7.731.103.768			71.550.115.085	601	21.695.480.203	1524	71.550.115.085	6315,86	3016,56	
			PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																						
			PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT STRUKTUR TEPAT FUNGSI																						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	98	138.056.160	%	95	110.241.723	%	98	133.536.700			49.836.000			3.611.800	6	53.447.800	18	163.689.523	150	118,57	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	12	138.056.160	Bin	12	110.241.723	Dok	12	133.536.700	Dok	3	49.836.000	Dok	3	3.611.800	6	53.447.800	18	163.689.523	150	118,57	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan	%	98	36.839.546.828	%	95	36.839.546.828	%	98	26.793.116.361			36.839.546.828	-		8.791.058.837	464	13.545.275.944	488	40.832.416.181	355	173,53	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang g Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
		Perangkat Daerah	Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentan																						
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	229	36.839.546.828	Bln	12	36.839.546.828	Orang	229	36.839.546.828	Orang	229	8.689.367.037	458	13.422.399.444	470	40.484.434.531	205	111,60	Bagian Perencanaa n dan Keuangan			
07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	561.832.924	Laporan	12	225.105.150	Laporan	12	200.586.644	Laporan	3	21.184.700	Laporan	3	101.691.800	6	122.876.500	18	347.981.650	150	61,94	Bagian Perencanaa n dan Keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	98	1.388.462.213	%	95	1.241.407.860	%	98	1.337.977.680			205.036.230			366.981.640	6	572.017.870	19	1.813.425.730	250	172,92	
02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	1.337.977.680	Bln	12	1.221.796.460	Dok	12	1.337.977.680	Dok	3	205.036.230	Dok	3	366.981.640	6	572.017.870	18	1.793.814.330	150	134,07	Bagian Umum

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
	06	Penatausahaan barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penyusunan dan Pelaporan Aset	Laporan	1	50.484.533	Laporan	1	19.611.400	Laporan	1	-	-	-	0	-	1	19.611.400	100	38,85	Bagian Umum				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	98	2.172.465.880	%	95	527.987.975	%	98	474.964.300	92.034.300	123.480.000	6	215.514.300	546	743.502.275	264,33	168,03					
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Olahraga			1.518.230.000	Stel	12	138.261.075			-	-	-	0	-	12	138.261.075	0	9,11	Bagian Umum				
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	388.035.880	Bln	12	364.726.900	Laporan	12	474.964.300	Laporan	3	92.034.300	Laporan	3	123.480.000	6	215.514.300	18	580.241.200	150	149,53	Bagian Umum
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Bln	12	266.200.000	Paket	1	25.000.000	Bln	12	-	-	-	0	-	1	25.000.000	8	9,39	Bagian Umum				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	98	6.071.003.840	%	95	3.521.264.112	%	98	2.899.372.235	615.882.499	787.401.850	48	1.403.284.349	147	4.924.548.461	1225,00	569,05					
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Laporan	12	220.256.784	Gedung	15	33.879.697	Laporan	12	23.489.400	Laporan	3	-	Laporan	3	18.254.310	6	18.254.310	21	52.134.007	175	23,67	Bagian Umum

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
		gan Bangunan Kantor	Kantor yang Disediakan																						
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Laporan	12	528.554.457	Bln	12	352.085.885	Laporan	12	168.003.300	Laporan	3	-	Laporan	3	86.309.830	6	86.309.830	18	438.395.715	150	82,94	Bagian Umum
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Laporan	12	104.306.453	Bln	12	85.863.500	Laporan	12	10.004.300	Laporan	3	10.004.300	Laporan	3	-	6	10.004.300	18	95.867.800	150	91,91	Bagian Umum
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	12	698.961.292	Bln	12	586.779.638	Laporan	12	123.003.500	Laporan	3	50.267.550	Laporan	3	15.575.000	6	65.842.550	18	652.622.188	150	93,37	Bagian Umum
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Laporan	12	24.249.852	Bln	12	10.562.400	Laporan	12	10.159.200	Laporan	3	2.641.500	Laporan	3	2.641.500	6	5.283.000	18	15.845.400	150	65,34	Bagian Umum
	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	2.430.618.960	Bln	12	1.315.007.500	Laporan	12	1.152.240.000	Laporan	3	344.640.000	Laporan	3	370.742.500	6	715.382.500	18	2.030.390.000	150	83,53	Bagian Umum
	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan	Laporan	12	1.862.062.224	Bln	12	1.077.816.292	Laporan	12	1.356.166.135	Laporan	3	191.462.049	Laporan	3	278.823.210	6	470.285.259	18	1.548.101.551	150	83,14	Bagian Perencanaa n dan Keuangan

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
			Konsultasi SKPD																						
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	12	201.993.818	Bln	12	59.269.200	Laporan	12	56.306.400	Laporan	3	16.867.100	Laporan	3	15.055.500	6	31.922.600	18	91.191.800	150	45,15	Bagian Umum
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	98	2.771.928.471	%	95	1.615.945.855	%	98	1.799.072.000			-			975.200.000	3	975.200.000,00	13	2.380.346.830	357	143,55	
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7	2.362.043.904	Unit	8	1.252.133.600	Unit	7	1.799.072.000	Unit	0	-	Unit	3	975.200.000	3	975.200.000	11	2.227.333.600	157	94	Bagian Umum
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair sesuai dengan Kebutuhan	Paket	1	310.697.067	Paket	2	153.013.230	Paket	1	-			-				0	-	2	153.013.230	200	49	Bagian Umum
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	99.187.500	Paket	2	210.799.025	Unit	2	-			-										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Jasa Penunjang Urusan	%	98	4.835.683.167	%	95	2.007.601.025	%	98	2.158.588.221			551.386.263			495.569.268	18	1.046.955.531	105	3.054.556.556	472	286,71	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
		Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah																						
01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	257.405.052	Bln	12	199.206.705	Laporan	12	117.518.500	Laporan	3	32.425.000	Laporan	3	11.060.000	6	43.485.000	18	242.691.705	150	94,28	Bagian Umum
02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.981.586.268	Lokasi	4	1.092.163.180	Laporan	12	1.344.968.071	Laporan	3	310.602.354	Laporan	3	322.001.143	6	632.603.497	10	1.724.766.677	83	87,04	Bagian Perencanaa n dan Keuangan
03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Flashdisk, AC Split, Genset, Komputer/ Notebook, Printer	Unit	43	1.583.490.913	Unit	67	53.550.800	Unit	40	-							0	-	67	53.550.800	156	3,38	Bagian Umum
04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.013.200.934	Lokasi	4	662.680.340	Laporan	12	696.101.650	Laporan	3	208.358.909	Laporan	3	162.508.125	6	370.867.034	10	1.033.547.374	83	102,01	Bagian Umum
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	98	2.474.339.234	%	95	6.102.948.267	%	98	1.041.766.770			59.049.591			599.205.710	12	658.255.301	26	6.761.203.568	217	447,62	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))			Realisasi Kinerja Triwulanan						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)							
													I		II		#	K								Rp. (000)		K		Rp. (000)		
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K								Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1		3	4	5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13								
		Urusan Pemerintah daerah	Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah																													
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan	12	867.747.795	Bln	12	401.066.100	Laporan	12	240.950.000	Laporan	3	59.049.591	Laporan	3	45.211.760	6	104.261.351	18	505.327.451	150	58,23	Bagian Umum							
	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitas	Laporan	12	1.606.591.439	Gedung	2	5.701.882.167	Laporan	12	553.993.950	Laporan	3	-	Laporan	3	553.993.950	6	553.993.950	8	6.255.876.117	67	389,39	Bagian Umum							
	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Gedung	2	246.822.820				Gedung	0															
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	Persentase Administrasi Keuangan	%	98	2.520.540.188	%	95	1.031.979.102	%	98	2.010.011.581			228.895.011		564.682.228	14	793.577.239	91	1.825.556.341	1516,67	146,34									

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))			Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100			
1		3	4	5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13	
		Wakil Kepala Daerah																							
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	1.859.290.188	Bln	12	899.674.702	Orang	2	1.776.557.781	Orang	2	228.895.011	Orang	0	458.232.228	2	687.127.239	14	1.586.801.941	700	85,34	Bagian Umum
02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan AtributKeleng kapan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaera h yang Disediakan	Paket	8	423.200.000	Stel	36	107.364.400	Paket	8	109.613.800	Paket	0	-	Paket	6	106.450.000	6	106.450.000	42	213.814.400	525	50,52	Bagian Umum
03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	238.050.000	Orang	29	24.940.000	Laporan	12	123.840.000	Laporan	3	-	Laporan	3	-	6	-	35	24.940.000	292	10,48	Bagian Umum
		Fasilitasi Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah	Persentase Meningkatnya kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	%	98	2.805.097.238	%	95	1.957.836.000	%	98	2.095.791.100			429.095.400			491.265.900	18	920.361.300	54	2.878.197.300	450	300,56	
01		Penyediaan Kebutuhan Rumah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga	Laporan	12	1.667.275.190	Bln	12	1.175.624.000	Laporan	12	1.224.528.250	Laporan	3	297.521.300	Laporan	3	253.811.150	6	551.332.450	18	1.726.956.450	150	103,58	Bagian Umum

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
		Tangga Kepala Daerah	Kepala Daerah yang Disediakan																						
	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Laporan	12	961.096.224	Bln	12	661.070.200	Laporan	12	748.862.850	Laporan	3	128.064.100	Laporan	3	194.941.750	6	323.005.850	18	984.076.050	150	102,39	Bagian Umum
	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Laporan	12	176.725.824	Bln	12	121.141.800	Laporan	12	122.400.000	Laporan	3	3.510.000	Laporan	3	42.513.000	6	46.023.000	18	167.164.800	150	94,59	Bagian Umum
		Penataan Organisasi	Indeks Pelayanan Publik	%	98	1.942.478.618	%	95	1.171.395.172	%	98	467.228.000			139.995.200			194.733.600	0	334.728.800	8	1.506.123.972	800	182,87	
	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dok	1	485.116.558	Draft Peraturan	2	331.992.382	Dok	1	194.209.000	Dok	0	99.500.900	Dok	0	56.121.000	0	155.621.900	2	487.614.282	200	0	Bagian Organisasi
	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	1	471.145.619	Laporan	2	361.821.590	Dok	1	71.464.800	Dok	0		Dok	0	31.295.500	0	31.295.500	2	393.117.090	200	0	Bagian Organisasi
	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	Dok	1	297.397.224	Draft	2	184.278.400	Dok	1	81.053.200	Dok	0	12.057.000	Dok	0	48.788.800	0	60.845.800	2	245.124.200	200	82,42	Bagian Organisasi

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
			Reformasi Birokrasi																						
	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	1	431.299.878	Laporan	1	244.925.200	Dok	1	77.659.200	Dok	0	16.628.500	Dok	0	40.229.100	0	56.857.600	1	301.782.800	100	69,97	Bagian Organisasi
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok	1	257.519.339	Draft Lap	1	48.377.600	Dok	1	42.841.800	Dok	0	11.808.800	Dok	0	18.299.200	-	30.108.000	1	78.485.600	100	30,48	Bagian Organisasi
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	98	4.715.060.071	%	95	3.489.686.579	%	98	2.330.530.132			605.676.167			571.185.602	6	1.176.861.769	9	4.666.548.348	258	306,80	
	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1.502.398.194	Laporan	1	1.367.146.650	Laporan	12	714.169.072	Laporan	3	185.255.300	Laporan	3	162.715.400	6	347.970.700	7	1.715.117.350	58	114,16	Bagian PKP
	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	710.456.413	Laporan	1	521.364.881	Laporan	1	372.849.800	Laporan	0	129.928.800	Laporan	0	89.726.550	-	219.655.350	1	741.020.231	100	104,30	Bagian PKP
	03	Pendokumenta sian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumenta	Laporan	1	2.502.205.464	Laporan	1	1.601.175.048	Laporan	1	1.243.511.260	Laporan	0	290.492.067	Laporan	0	318.743.652	-	609.235.719	1	2.210.410.767	100	88,34	Bagian PKP

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)				
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
			sian Tugas Pimpinan																					
			Rata-rata capaian kinerja (%)																526,32	251,38				
			Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		PROGRAM PEMERINTAH AN DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	%	98	133.737.783.437	%	95	133.737.783.437	%	98	37.557.404.484												
			Persentase koordinasi Pemerintahan													195	25.979.617.851	528,00	65.381.406.860	21629,22	899,55			
			Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji																					
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tata Kelola Pemerintahan	%	98	5.452.632.003	%	95	1.193.060.900	%	98	278.971.940				77.439.300		57.411.800	0	134.851.100	3	1.327.912.000	300,00	135,14

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang g Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
			yang dilaksanakan																						
	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	1	3.419.540.296	Dok	1	315.522.000	Dok	1	86.604.175	Dok	0	1.036.000	Dok	0	18.277.000	0	19.313.000	1	334.835.000	100	9,79	Bagian Tapem
	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Dok	1	646.431.852	Dok	1	573.743.400	Dok	1	97.487.840	Dok	0	70.607.800	Dok	0	6.353.700	0	76.961.500	1	650.704.900	100	100,66	Bagian Tapem
	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	1	1.386.659.855	Dok	1	303.795.500	Dok	1	94.879.925	Dok	0	5.795.500	Dok	0	32.781.100	0	38.576.600	1	342.372.100	100	24,69	Bagian Tapem
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan	%	98	124.573.555.568	%	95	124.573.555.568	%	98	35.755.562.821			124.573.555.568			12.096.146.500	0	24.820.862.221	202	60.542.522.939	20200	121,63	
	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	1	118.141.556.000	Dok	1	118.141.556.000	Dok	1	118.141.556.000	Dok	0	118.141.556.000	Dok	0	11.713.604.000	0	24.409.178.121	1	58.238.539.409	100	49,30	Bagian Kesra
	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	Dok	1	6.000.000.000	Orang	200	1.748.673.830	Dok	1	2.055.708.800	Dok	0	20.057.800	Dok	0	377.280.000	0	397.337.800	200	2.146.011.630	20000	35,77	Bagian Kesra

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))			Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100			
1		3	4	5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13	
			Kesejahteraan Sosial																						
	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dok	1	431.999.568	Laporan	1	143.625.600	Dok	1	28.966.000	Dok	0	9.083.800	Dok	0	5.262.500	0	14.346.300	1	157.971.900	100	36,57	Bagian Kesra
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan	%	98	2.784.048.828	%	95	1.356.472.781	%	98	579.912.100			143.465.000			77.880.000	195	221.345.000	315	1.577.817.781	329,22	79,39	
	01	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Perda	6	785.810.784	Perda	9	281.687.000	Perda	6	168.432.000	Perda	0	38.805.000	Perda	0	35.887.500	0	74.692.500	9	356.379.500	150	45,35	Bagian Hukum
	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Laporan	1	1.417.382.868	Laporan	1	388.175.000	Laporan	1	286.264.800	Laporan	0	73.495.000	Laporan	0	20.750.000	0	94.245.000	1	482.420.000	100	34,04	Bagian Hukum
	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Buku	385	580.855.176	Anggota	110	686.610.781	Buku	385	125.215.300	Buku	170	31.165.000	Buku	25	21.242.500	195	52.407.500	305	739.018.281	79	0	Bagian Hukum
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerja sama Daerah	%	98	927.547.038	%	95	1.130.594.610	%	98	942.957.623			746.602.430			55.957.100	0	802.559.530	8	1.933.154.140	800	563,39	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))			Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang g Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5			6			7			8			9			#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100				
1		3	4	5			6			7			8			9			#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13		
	01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dok	1	313.780.685	Naskah	6	194.304.000	Dok	1	103.352.508	Dok	0	10.852.700	Dok	0	34.009.800		0	44.862.500	6	239.166.500	600	76,22	Bagian Kerjasama		
	02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dok	1	363.436.326	Dok	1	789.269.310	Dok	1	765.069.500	Dok	0	727.134.130	Dok	0	8.147.500		0	735.281.630	1	1.524.550.940	100	419,48	Bagian Kerjasama		
	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	250.330.027	Dokumen Evaluasi	1	147.021.300	Laporan	1	74.535.615	Laporan	0	8.615.600	Laporan	0	13.799.800		0	22.415.400	1	169.436.700	100	67,69	Bagian Kerjasama		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									5407	224,89		
Predikat kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PEREKONOM IAN DAN PEMBANGUN AN	Persentase pengendalian perkembang an usaha BUMD	%	98	5.950.445.697	%	95	4.205.967.673	%	98	1.962.488.975			326.813.949					7	951.642.374	162	5.157.610.047	1305	#####			
			Persentase kualitas pengendalian pembanguna n																									
			Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi																									

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang g Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
			standar ketepatan waktu																						
			Persentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah																						
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	%	98	831.133.148	%	95	1.340.468.151	%	98	379.590.200		51.114.500		124.472.600	1	175.587.100	5	1.516.055.251	350	561,76			
	01	Koordinasi, Sinkronasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dok	2	211.481.500	Laporan	2	601.852.851	Dok	2	211.481.500	Dok	0	11.016.400	Dok	1	93.054.000	1	104.070.400	3	705.923.251	150	333,80	Bagian Perekonomian
	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	Laporan	1	460.035.466	Laporan	1	634.511.100	Laporan	1	111.381.700	Laporan	0	24.083.100	Laporan	0	24.777.100	0	48.860.200	1	683.371.300	100	148,55	Bagian Perekonomian

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang g Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13					
			dan Distribusi Perekonomian																						
	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan	1	159.616.182	Laporan	1	104.104.200	Laporan	1	56.727.000	Laporan	0	16.015.000	Laporan	0	6.641.500	0	22.656.500	1	126.760.700	100	79,42	Bagian Perekonomi an
		Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembanguna n	%	98	1.296.269.515	%	95	1.187.919.600	%	98	447.937.575			93.618.500			141.561.740	0	235.180.240	3	1.423.099.840	300	318,17	
	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dok	1	508.200.000	Laporan	1	588.536.800	Dok	1	267.397.600	Dok	0	22.895.800	Dok	0	120.308.640	0	143.204.440	1	731.741.240	100	143,99	Bagian Adbang
	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	435.600.000	Laporan	1	339.094.100	Laporan	1	122.278.475	Laporan	0	58.030.800	Laporan	0	8.501.100	0	66.531.900	1	405.626.000	100	93,12	Bagian Adbang
	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	352.469.515	Aplikasi	1	260.288.700	Laporan	1	58.261.500	Laporan	0	12.691.900	Laporan	0	12.752.000	0	25.443.900	1	285.732.600	100	81,07	Bagian Adbang
		Pengelolaan Pengadaan	Persentase Pengelolaan pengadaan	%	98	3.326.082.131	%	95	1.314.692.422	%	98	541.526.600			130.709.749			151.643.885	2	282.353.634	143	1.597.046.056	230	124,54	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
				5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100						
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13				
		Barang dan Jasa	Barang dan Jasa																						
	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	5	1.988.352.752	Laporan	5	865.879.772	Laporan	5	354.769.600	Laporan	1	90.906.600	Laporan	1	151.643.885	2	242.550.485	7	1.108.430.257	140	55,75	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dok	1	583.823.028	Aplikasi, Laporan	1	100.958.750	Dok	1	24.314.000	Dok	0	2.130.000	Dok	0	-	0	2.130.000	1	103.088.750	0	17,66	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	753.906.351	PPK	135	347.853.900	Orang	150	162.443.000	Orang	0	37.673.149	Orang	0	-	0	37.673.149	135	385.527.049	90	51,14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan sumberdaya alam yang dievaluasi	%	98	496.960.903	%	95	362.887.500	%	98	593.434.600			51.371.200			207.150.200	4	258.521.400	11	621.408.900	425	330,81	
	01	Koordinasi, Sinkronasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	Laporan	4	227.381.675	Laporan	4	221.213.200	Laporan	4	471.943.800	Dok	1	24.641.800	Dok	2	182.904.700	3	207.546.500	7	428.759.700	175	188,56	Bagian SDA

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))			Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang gung Jawab (Bagian)				
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I		II		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.					
1		3	4	5			6			7			8		9		#	10 = 8+9+10+11		141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13			
			Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja																								
	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Laporan	2	130.429.228	Laporan	2	54.974.400	Laporan	2	52.225.600	Dok	0	12.628.700	Dok	1	11.410.200	1	24.038.900	3	79.013.300	150	60,58	Bagian SDA		
	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan	1	139.150.000	Laporan	1	86.699.900	Laporan	1	69.265.200	Dok	0	14.100.700	Dok	0	12.835.300	0	26.936.000	1	113.635.900	100	81,66	Bagian SDA		
Rata-rata capaian kinerja (%)																								326,25	333,82		
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Sa sar an	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023(TW II))		Realisasi Kinerja Triwulanan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penang ung Jawab (Bagian)
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1		3	4	5		6		7		8		9		#	10 = 8+9+10+11	141= 6 + 12		12 = 14/5*100		13
																		6042,3 8	587,54	
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
NIHIL								

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat Darah tidak mempunyai SPM, namun sangat mendukung untuk seluruh kegiatan dan kelancaran SPM yang berada di Kabupaten Garut.

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

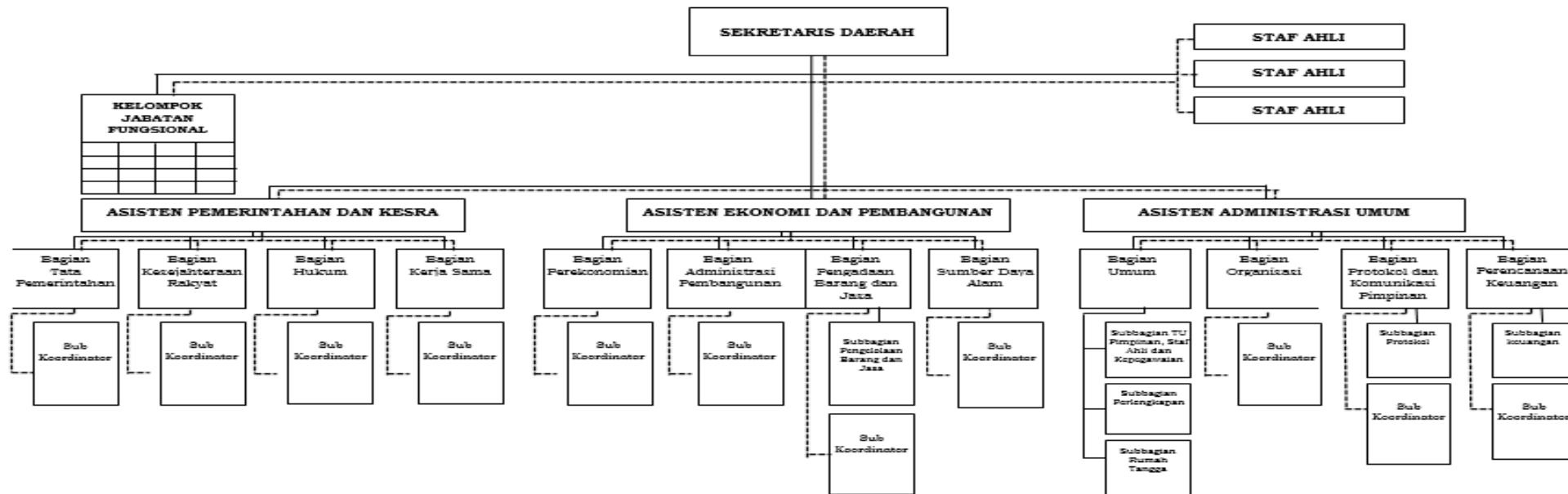
Sekretarita Darah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Sekretarita Darah Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretarita Darah berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 235 TAHUN 2021



KETERANGAN:
 _____ = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

sumber: peraturan bupati garut nomor 235 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan bupati garut nomor 27 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten garut

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut:

Berdasarkan Kepada Peraturan Bupati Garut Nomor 243 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kedua Sekretariat Daerah, Pada BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS, Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur bawahan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana serta sarana pemerintahan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi daerah serta visi dan misi Bupati;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam lingkup:
 - 1. urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2. keuangan daerah;
 - 3. barang milik daerah;
 - 4. pemerintahan umum;
 - 5. pembangunan daerah; dan
 - 6. fungsi Pemerintahan Daerah lainnya.
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati dan penyempurnaan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
 - e. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Staf Ahli, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui rapat-rapat intern dan/atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membina para Staf Ahli, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta bawahan dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur Pemerintah Daerah;
 - g. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan tugas dengan instansi/lembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

i. mengendalikan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah;

j. mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan Pemerintah Daerah;

k. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Bupati;

l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

(4) Sekretaris Daerah, membawahkan:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

c. Asisten Administrasi Umum; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

b. Bagian Tata Pemerintahan;

c. Bagian Hukum;

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

e. Bagian Kerjasama.

a.1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :

a. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;

b. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan;

dan

c. Sub Koordinator Otonomi Daerah.

b.1. Bagian Hukum membawahkan :

a. Sub Koordinator Perundang-undangan;

b. Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan

c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.

c.1. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan :

a. Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;

- b. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.
- d.1. Bagian Kerjasama membawahkan :
- a. Sub Koordinator Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
 - b. Sub Koordinator Evaluasi Kerjasama.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahkan :
- a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - d. Bagian Sumber Daya Alam.
- a.1. Kepala Bagian Perekonomian membawahkan :
- a. Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
 - c. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- a.2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
- a. Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - b. Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
 - c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
- a.3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
- a. Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- a.d. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan :
- a. Sub Koordinator Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Sub Koordinator Sumber Daya Alam Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air.

3. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi;
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Tabel 2. 9
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	NIHIL										

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

(Selaraskan dengan gambaran permasalahan yang terjadi dan dialami di lingkungan kerja SKPD maupun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dalam pelayanan/ permasalahan yang dihadapi di masyarakat, yang menimbulkan terjadi perubahan perencanaan misal isu bidang kesehatan/Penanganan stunting dan isu penanganan kebencanaan, peningkatan pendapatan/Umkm, fasilitasi Penanganan kemiskinan ekstrim, fasilitasi Pelayanan public, Penguatan Demokrasi, infrastruktur Dan peningkatan kapasitas SDM).

Jika memungkinkan isu-isu yang dijelaskan di dukung dengan data yang ada, karena isu yang dialami akan sangat berkaitan dengan persetujuan terhadap program yang diajukan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;

- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari DBHCHT, bantuan keuangan provinsi Jawa Barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/revisi rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Sekretariat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 1 bidang urusan yaitu Unsur Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 3 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 20 kegiatan, yang terdiri dari 60 sub kegiatan;

Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp88.103.315.677.00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp88.103.315.677.00 Secara kronologis, pagu indikatif Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp83.061.848.539,00 dan mengalami penyesuaian sebesar Rp5.041.467.138,00. pada APBD Tahun 2023 menjadi

Rp88.103.315.677.00, dan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 mencapai sebesar Rp88.103.315.677.00 atau bertambah Rp5.041.467.138,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023 (parsial III).

4. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah : Sekretaris Daerah Kabupaten Garut

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH					115.570.065.222	SEKRETARIAT DAERAH					115.570.065.222
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.090.326.682	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					66.090.326.682
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					162.583.907	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					162.583.907
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	162.583.905	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	162.583.905		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.098.264.645	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.098.264.645
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	31.752.713.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	31.752.713.600		
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	329.051.045	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	329.051.045		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.616.694.777	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.616.694.777

02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.383.318.525	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.383.318.525	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	101.589.620	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	101.589.620	
Administrasi istrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.171.842.682	Administrasi istrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.171.842.682
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	39.625.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	39.625.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	356.697.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	356.697.000	
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	476.574.862	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	476.574.862	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	57.750.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	57.750.000	
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	11.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	11.000.000	

							Semua Kelurahan				
08	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	110.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	110.000.000	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	120.195.820	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	120.195.820	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.656.780.846	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.656.780.846	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	145.869.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	145.869.900	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	931.550.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	931.550.180	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	214.498.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	214.498.900	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	642.478.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	642.478.750	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	11.171.160	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	11.171.160	

08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.413.664.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.413.664.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.188.593.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.188.593.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	84.754.956	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	84.754.956	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.674.764.560	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.674.764.560	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.190.412.400	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.190.412.400	
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	218.790.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	218.790.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	138.837.160	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	138.837.160	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	6.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	6.000.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.682.439.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.682.439.840	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	241.259.480	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	241.259.480	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	1.522.534.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	1.522.534.500	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	152.471.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	152.471.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	766.174.860	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	950 %	766.174.860	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.657.348.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.657.348.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	587.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	587.510.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	195.538.750	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	195.538.750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.849.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.849.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	25.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	25.300.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.402.772.736	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.402.772.736	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.114.847.736	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.114.847.736	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	139.623.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	139.623.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	148.302.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	148.302.000	
	Administrasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		2.782.589.409	Administrasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				2.782.589.409	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.725.577.409	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.725.577.409	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	911.944.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	911.944.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	145.068.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	145.068.000	
	Penataan Organisasi				1.461.933.530	Penataan Organisasi				1.461.933.530	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	160.480.300	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	160.480.300	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	430.395.570	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	430.395.570	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	269.720.550	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	269.720.550	

	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	431.299.550	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	431.299.550	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	170.037.560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	170.037.560	
	Penatanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		4.722.311.000	Penatanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		4.722.311.000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.932.571.300	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.932.571.300	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	761.076.800	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	761.076.800	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.028.662.900	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.028.662.900	
	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				44.842.715.412	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				44.842.715.412	
	Administrasi Tata Pemerintahan				2.140.854.375	Administrasi Tata Pemerintahan				2.140.854.375	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	810.213.525	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	810.213.525	
	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	880.097.680	Pengelolaan Administrasi Wilayah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	880.097.680	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	450.543.170	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	450.543.170	

	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		39.758.530.270	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		39.758.530.270	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	36.000.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	36.000.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	3.573.725.100	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	3.573.725.100	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	184.805.170	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	184.805.170	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		730.261.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		730.261.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	209.679.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	209.679.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	360.197.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	360.197.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	160.385.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	160.385.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				2.213.069.767	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				2.213.069.767	

	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	340.335.710	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	340.335.710	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.658.986.350	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.658.986.350	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	213.747.707	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	213.747.707	
	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.637.023.128	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				4.637.023.128	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.183.693.500	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				1.183.693.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	334.598.770	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	334.598.770	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	507.402.500	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	507.402.500	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	341.692.230	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	96 %	341.692.230	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.220.081.500	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.220.081.500	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	626.326.800	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	626.326.800	

		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	263.754.700	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	263.754.700	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	330.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	330.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.735.609.500	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		1.735.609.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	875.034.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	875.034.600	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	140.601.600	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	140.601.600	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	719.973.300	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	85 % 95 %	719.973.300	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		497.638.628	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan		497.638.628	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	239.859.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	239.859.400	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	118.629.228	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	118.629.228	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	139.150.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	139.150.000	
					115.570.065.222					115.570.065.222	

TABEL 2.10

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
4																				
4	01			SEKRETARIAT DAERAH					97.203.256.089	88.103.315.677								115.570.065.222		
4	01	01						58.354.834.545	45.401.167.218									66.090.326.682		
4	01	01	2,01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98%		98%	133.536.700	133.536.700								162.583.907	Bagian Keuangan	
4	01	01	2,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	kualitas Perencanaan, pelayanan umum,	12 Dokumen	133.536.700	133.536.700	113.536.700	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Dokumen	95 %	162.583.905		
4	01	01	2,02	Administrasi Keuangan		95%		95%	31.120.415.671	28.115.746.896		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih						32.098.264.645	Bagian Keuangan	
4	01	01	2,02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 orang	kualitas Pengadministrasian keuangan	148 orang	30.910.238.777	27.915.160.252	27.849.818.736	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	ASN	95 %	31.752.713.600	Bagian Keuangan	

4	01	01	2,02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	kualitas Pengadministrasian keuangan	12 Bulan	210.176.894	200.586.644	170.586.644	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	329.051.045	Bagian Keuangan
4	01	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		95		95	1.337.977.680	1.337.977.680		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			1.616.694.777	Bagian Umum
4	01	01	2,03	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Bulan	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	1.337.977.680	1.337.977.680	1.337.977.680	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	1.383.318.525	Bagian Umum
4	01	01	2,03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	101.589.620	Bagian Umum
4	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		98		98	490.564.300	474.964.300		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			1.171.842.682	Bagian Umum
4	01	01	2,05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	39.625.000	Bagian Umum
4	01	01	2,05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong	Dana Transfer Umum-Dana	v		95 %	356.697.000	Bagian Umum

					beserta Atribut Kelengkapan		Perang kat Daerah					Kidul, Sukagalih	Alokasi Umum						
4	01	01	2,05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	490.564.300	474.964.300	411.164.300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	476.574.862	Bagian Umum	
4	01	01	2,05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	57.750.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	0	Bagian Umum	
4	01	01	2,05	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	0	Bagian Umum	
4	01	01	2,05	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terselesaikannya Purna Tugas ASN	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	11.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,05	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	12 Bulan	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	0	Bagian Umum	

4	01	01	2,05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	0	Bagian Umum
4	01	01	2,05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	110.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	12 Bulan	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	120.195.820	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		98%		98%	3.717.251.100	2.899.372.235				v		6.656.780.846	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	23.489.400	23.489.400	23.489.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	145.869.900	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	168.003.300	168.003.300	196.081.271	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	931.550.180	Bagian Umum

4	01	01	2,06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	10.004.300	10.004.300	10.004.300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	214.498.900	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	123.003.500	123.003.500	174.862.300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	642.478.750	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	10.159.200	10.159.200	10.159.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	11.171.160	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	1.351.285.000	1.152.240.000	1.327.020.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	2.413.664.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	1.975.000.000	1.356.166.135	1.100.966.135	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	2.188.593.000	Bagian Umum
4	01	01	2,06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan	kualitas pelayanan Umum	12 Bulan	56.306.400	56.306.400	56.306.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	84.754.956	Bagian Umum
4	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98%		98%	11.799.072.000	1.799.072.000				v		8.674.764.560	Bagian Umum

4	01	01	2,07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	7 Unit	1.799.072.000	1.799.072.000	1.758.060.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	2.190.412.400	Bagian Umum
4	01	01	2,07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 U nit	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	1 U nit	0	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	218.790.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	2 Unit	0	0	69133300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	138.837.160	Bagian Umum
4	01	01	2,07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Lokasi	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	4 Lokasi	0	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	6.000.000.000	Bagian Umum
4	01	01	2,07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Lokasi	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	4 Lokasi	10.000.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	0	Bagian Umum
4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98%		98%	2.158.588.221	2.158.588.221		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v		2.682.439.840	Bagian Umum
4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43 Surat	Persen tase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Surat	117.518.500	117.518.500	117.518.500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	950 %	241.259.480	Bagian Umum

4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumber Daya Listrik dan Telekomunikasi	12 Bulan	Persen tase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1.344.968.071	1.344.968.071	1.320.968.071	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	950 %	1.522.534.500	Bagian Umum
4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	Persen tase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	0	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	950 %	152.471.000	Bagian Umum
4	01	01	2,08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Persen tase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	696.101.650	696.101.650	696.101.650	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	950 %	766.174.860	Bagian Umum
4	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98		98	487.772.820	1.041.766.770				v		2.657.348.750	Bagian Umum
4	01	01	2,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 unit	240.950.000	240.950.000	306.950.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	587.510.000	Bagian Umum
4	01	01	2,09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 buah	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 buah	0	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	195.538.750	Bagian Umum
4	01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Lokasi	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada	4 Lokasi	0	553.993.950		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana	v	95 %	0	Bagian Umum

					yang Dipelihara/Di rehabilitasi		Perangkat Daerah						Alokasi Umum						
4	01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	98%	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	246.822.820	246.822.820	321.822.820	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	1.849.000.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Lokasi	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Lokasi	0	0		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	25.300.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		98%		98%	2.010.011.581	1.998.477.444		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			1.402.772.736	Bagian Umum	
4	01	01	2,11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	2 orang	1.776.557.781	1.765.023.644	1.776.557.781	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	1.114.847.736	Bagian Umum	
4	01	01	2,11	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	8 Paket	109.613.800	109.613.800	109.613.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	139.623.000	Bagian Umum	

4	01	01	2,11	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	2 orang	123.840.000	123.840.000	123.840.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	148.302.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,12	Administrasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		98%		98%	2.095.791.100	2.095.791.100		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v		2.782.589.409	Bagian Umum	
4	01	01	2,12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	22 Paket	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	22 Paket	1.224.528.250	1.224.528.250	1.351.898.250	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	1.725.577.409	Bagian Umum	
4	01	01	2,12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	22 Paket	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	22 Paket	748.862.850	748.862.850	748.862.850	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	911.944.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	22 Paket	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	22 Paket	122.400.000	122.400.000	122.400.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	95 %	145.068.000	Bagian Umum	
4	01	01	2,13	Penataan Organisasi		98		98	535.752.600	535.752.200				v		1.461.933.530	Bagian Organisasi	
4	01	01	2,13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	194.209.000	194.209.000	194.209.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	160.480.300	

					Analisis Jabatan															
4	01	01	2,13	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	88.959.800	71.464.800	71.464.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Dokumen	95 %	430.395.570		
4	01	01	2,13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	99.579.200	81.053.200	81.053.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Dokumen	95 %	269.720.550		
4	01	01	2,13	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	98.128.800	146.183.400	146.183.400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Dokumen	95 %	431.299.550		
4	01	01	2,13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	1 Dokumen	54.875.800	42.841.800	42.841.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Dokumen	95 %	170.037.560		
4	01	01	2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		98		98	2.468.100.772	2.810.121.672		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih			v			4.722.311.000	Bagian PKP	
4	01	01	2,14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Terselenggaranya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	742.932.472	1.086.806.472	1.086.806.472	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		v	Laporan	95 %	1.932.571.300		

4	01	01	2,14	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Terselenggara nya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	403.466.300	401.613.200	401.613.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Laporan	95 %	761.076.800		
4	01	01	2,14	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokume ntasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Terselenggara nya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1.321.702.000	1.321.702.000	1.321.702.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Laporan	95 %	2.028.662.900		
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						36.718.569.744	40.739.659.684		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			44.842.715.412	
4	01	02	2,01	Administrasi Tata Pemerintahan		98%		98%	341.727.500	278.971.940		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			2.140.854.375	Bagian Tapem	
4	01	02	2,01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Terlaksananya a Tata pemerintahan yang dilaksanakan	1 Dokumen	99.019.900	86.604.175	86.604.175	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	810.213.525		
4	01	02	2,01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen	Terlaksananya a Tata pemerintahan yang dilaksanakan	1 Dokumen	120.335.300	97.487.840	187.487.840	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	880.097.680		
4	01	02	2,01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya a Tata pemerintahan yang dilaksanakan	1 Dokumen	122.372.300	94.879.925	94.879.925	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	450.543.170		
4	01	02	2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		98%		98%	35.496.349.521	38.937.818.021				v			39.758.530.270	Bagian Kesra	

4	01	02	2,02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	1 Dokumen	33.379.913.021	36.853.143.221	37.800.118.421	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	v	Dokumen	95 %	36.000.000.000		
4	01	02	2,02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	1 Dokumen	2.070.220.500	2.055.708.800	2.055.708.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	3.573.725.100		
4	01	02	2,02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	1 Dokumen	46.216.000	28.966.000	28.966.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dokumen	v	Laporan	95 %	184.805.170	
4	01	02	2,03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		98%		98%	635.010.800	579.912.100				v			730.261.000	Bagian Hukum	
4	01	02	2,03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6 Produk	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6 Produk	182.330.000	168.432.000	168.431.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	209.679.000		
4	01	02	2,03	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5 Kasus	313.215.500	286.264.800	191.666.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		95 %	360.197.000		
4	01	02	2,03	Pendokumentasian Produk Hukum dan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan	385	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	385	139.465.300	125.215.300	219.814.100	Kab. Garut, Tarogong	Dana Transfer Umum-Dana	v		95 %	160.385.000		

				Pengelolaan Informasi Hukum	Informasi Hukum yang Didokumentasi						Kidul, Sukagalih	Alokasi Umum								
4	01	02	2,04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		98%		98%	245.481.923	942.957.623				v				2.213.069.767	Bagian Kerjasama	
4	01	02	2,04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	Terfasilitasinya kerjasama daerah	1 Dokumen	121.355.508	103.352.508	103.352.508	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Dokumen	95 %		340.335.710		
4	01	02	2,04	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Terfasilitasinya kerjasama daerah	1 Dokumen	28.732.400	765.069.500	940.069.500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Dokumen	95 %		1.658.986.350		
4	01	02	2,04	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Terfasilitasinya kerjasama daerah	1 Laporan	95.394.015	74.535.615	74.535.615	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Laporan	95 %		213.747.707		
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2.129.851.800	1.962.488.775				v				4.637.023.128	
4	01	03	2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		98%		98%	428.520.600	379.590.000		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v				1.183.693.500	Bagian Ekonomi	
4	01	03	2,01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	2 Dokumen	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhadap perekonomian	2 Dokumen	231.272.100	211.481.500	184.724.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	96 %		334.598.770		

				BUMD dan BLUD	Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
4	01	03	2,01	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhadap perekonomian	1 Laporan	137.316.100	111.381.700	361.381.700	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v		96 %	507.402.500		
4	01	03	2,01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhadap perekonomian	1 Dokumen	59.932.400	56.726.800	56.726.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	96 %	341.692.230		
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		98%		98%	503.607.600	447.937.575				v			1.220.081.500	Bagian Adbang	
4	01	03	2,02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	267.397.600	267.397.600	366.041.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Laporan	95 %	626.326.800		
4	01	03	2,02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	Administrasi Pembangunan	1 Laporan	177.948.500	122.278.475	122.372.575	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Laporan	95 %	263.754.700		

4	01	03	2,02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	1 Laporan	Administrasi Pembangunan	1 Laporan	58.261.500	58.261.500	109.617.500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Laporan	95 %	330.000.000	
4	01	03	2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		98%		98%	541.526.600	541.526.600				v			1.735.609.500	Bagian PBJ
4	01	03	2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Perundang-undangan	1 Laporan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma	1 Laporan	354.769.600	354.769.600	406.107.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Laporan	85 % 95 %	875.034.600	
4	01	03	2,03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Paket Tender yang dilaksanakan UKPBJ	3 Paket	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma	3 Paket	24.314.000	24.314.000	14.421.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v		85 % 95 %	140.601.600	
4	01	03	2,03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa	15 Laporan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif,	15 Laporan	162.443.000	162.443.000	120.997.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Laporan	85 % 95 %	719.973.300	

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa		Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma												
4	01	03	2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		98%		98%	656.197.000	593.434.600		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih		v			497.638.628	Bagian SDA	
4	01	03	2,04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	1 Dokumen	534.706.200	471.943.800	471.943.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	v	Dokumen	95 %	239.859.400		

4	01	03	2,04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	1 Dokumen	52.225.600	52.225.600	52.225.600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	118.629.228
4	01	03	2,04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1 Dokumen	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	1 Dokumen	69.265.200	69.265.200	69.265.200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	v	Dokumen	95 %	139.150.000
TOTAL									97.203.256.089	88.103.315.677	88.660.330.969					115.570.065.222	

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas Pembangunan Daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Sekretariat Daerah yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Visi pembangunan Daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa :

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;

2. Maju :

Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;

3. Sejahtera :

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
- b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;

- c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir.
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin

dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;

PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;

PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;

PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;

PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;

PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi satu (sesuaikan misi dengan tusi/urusan SKPD) yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait (sesuaikan tujuan dengan urusan/tusi SKPD) adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran (sesuaikan sasaran dengan urusan/tusi SKPD) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Sekretariat Daerah adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Berdasarkan Peraturan Bupati Garut nomor 243 tahun 2021 Tentang Tugas fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas dan fungsi :

- Sekretaris Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana serta sarana pemerintahan daerah.
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Uraian tugas Sekretaris Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi daerah serta visi dan misi Bupati;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam lingkup:

1. urusan Pemerintahan Daerah;
 2. keuangan daerah;
 3. barang milik daerah;
 4. pemerintahan umum;
 5. pembangunan daerah; dan
 6. fungsi Pemerintahan Daerah lainnya.
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati dan penyempurnaan kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
 - f. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Staf Ahli, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui rapat-rapat intern dan/atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. membina para Staf Ahli, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta bawahan dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur Pemerintah Daerah;
 - h. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan tugas dengan instansi/lembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - j. mengendalikan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah;
 - k. mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan Pemerintah Daerah;
 - l. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Bupati;
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

➤ Sekretaris Daerah, membawahkan:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Atas dasar tersebut, maka dirumuskan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 145 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 35 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MISI 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya									
1.1.									
	Meningkatkan kehidupan sosial bergama yang berlandaskan nilai keagamaan dan nilai budaya	Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah	Prosentase kebijakan keagamaan, lingkup social dan kemasyarakatan.		90%	95%	97%	98%	98%
MISI 2 : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.									
2.1									
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD			Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		4.00	4.00	4.300	4,50	4.70
			Hasil Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada SKPD dan Unit Kerja		3,85 Baik	4,00 Baik	4,30 Sangat Baik	4,50 Sangat Baik	4,80 Pelayanan Prima
			Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH		90%	95%	95%	98%	98%

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah, Dengan indikator : Prosentase kebijakan keagamaan, lingkup sosial dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah, dengan Indikator :
 - a. Nilai LPPD
 - b. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - c. Hasil Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada SKPD dan Unit Kerja.
 - d. Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1

**TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan kehidupan sosial bergama yang berlandaskan nilai keagamaan dan nilai budaya	Meningkatkan kehidupan sosial bergama yang berlandaskan nilai keagamaan dan nilai budaya	Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah	Prosentase kebijakan keagamaan, lingkup sosial dan kemasyarakatan.	98%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Sangat tinggi
				Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4,50
				Hasil Survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada SKPD dan Unit Kerja	4,50 Sangat Baik
				Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/ WKDH	98%

Sumber : Perubahan Renstra 2019 - 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan;

perubahan pagu program, kegiatan atau sub kegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau sub kegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA
TAHUN 2023**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DAERAH			89.726.235.700
				45.752.112.041
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45.752.112.041
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		133.536.700
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.536.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		28.115.746.919
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.915.160.275
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	200.586.644
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.337.977.680
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.337.977.680
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		474.964.300
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	474.964.300
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.050.317.035
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.489.400
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.003.300
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.004.300
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.003.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.159.200

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.253.184.800
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.356.166.135
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.306.400
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.799.072.000
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.799.072.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.158.588.221
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	117.518.500
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.344.968.071
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.101.650
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.091.766.770
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.950.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	553.993.950
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246.822.820
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.998.477.444
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.765.023.644
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.613.800
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	123.840.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		2.245.791.100
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.374.528.250
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	748.862.850
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	122.400.000
		Penataan Organisasi		535.752.200
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	194.209.000
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	71.464.800

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	81.053.200
			Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	146.183.400
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	42.841.800
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2.810.121.672
			Fasilitasi Keprotokolan	1.086.806.472
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	401.613.200
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.321.702.000
			NON ADUM	43.974.123.659
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			41.511.634.884
		Administrasi Tata Pemerintahan		278.971.940
			Penataan Administrasi Pemerintahan	86.604.175
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	97.487.840
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	94.879.925
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		39.709.793.221
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	37.625.118.421
			Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2.055.708.800
			Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	28.966.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		579.912.100
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	168.432.000
			Fasilitasi Bantuan Hukum	286.264.800
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	125.215.300
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		942.957.623
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	103.352.508
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	765.069.500
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	74.535.615
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2.462.488.775

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		379.590.200
			Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	211.481.500
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.381.700
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	56.727.000
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		447.937.575
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	267.397.600
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	122.278.475
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	58.261.500
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		541.526.600
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	354.769.600
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	24.314.000
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	162.443.000
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		1.093.434.400
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	971.943.600
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	52.225.600
			Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	69.265.200
	TOTAL			89.726.235.700

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut : (sesuaikan dengan perubahan yang di lakukan)

1. Jumlah Bidang Urusan Pemerintahan Sebanyak 1 Bidang Urusan Yaitu Bidang Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
2. Jumlah Program Sebanyak 3 Program, Yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

3. Jumlah Kegiatan Sebanyak 20 Kegiatan;

4. Jumlah Sub Kegiatan Sebanyak 66 Subkegiatan;

- ✓ Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp 89.726.235.700,-,
- ✓ dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 97.203.256.089,-
- ✓ mengalami penyesuaian sebesar Rp7.477.020.389,-
- ✓ pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 89.726.235.700,-,
- ✓ dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 kembali mengalami penyesuaian sebesar Rp.620.012.537,00 menjadi sebesar Rp.5.620.012.537,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

Tabel 3.3

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

Unit Organisasi : 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

Sub Unit Organisasi : 4.01 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										97.203.256.089	88.103.315.677					115.570.065.222
4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										58.354.834.545	45.401.167.218					66.090.326.682
4	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										133.536.700	133.536.700					162.583.907
4	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kualitas Perencanaan, pelayanan umum,	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	7 Dokumen	7 Dokumen	95 %	95 %	133.536.700	133.536.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	162.583.905
4	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										31.120.415.671	28.115.746.896					32.098.264.645
4	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	kualitas Pengadministrasian keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	250 Orang/bulan	250 Orang/bulan	95 %	95 %	30.910.238.777	27.915.160.252	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	31.752.713.600
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	kualitas Pengadministrasian keuangan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	5 Laporan	5 Laporan	95 %	95 %	210.176.894	200.586.644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	329.051.045

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah								
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD																
4	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1.337.977.680	1.337.977.680					1.616.694.777	
4	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.337.977.680	1.337.977.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.383.318.525
4	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	umlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	101.589.620
4	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										490.564.300	474.964.300					1.171.842.682	
4	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 UNit	2 UNit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	39.625.000
4	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	356.697.000
4	01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	490.564.300	474.964.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	476.574.862

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	57.750.000
4	01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0
4	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Orang	1 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0
4	01	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Terselesaikannya Purna Tugas ASN	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	11.000.000
4	01	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 Orang	2 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0
4	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	95 %	95 %	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0
4	01	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	35 orang	35 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	110.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Adminis trasi Kepegawaian Perang kat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	50 orang	50 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	120.195.820
4	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah											3.717.251.100	2.899.372.235				6.656.780.846
4	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 paket	1 paket	100 %	100 %	23.489.400	23.489.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	145.869.900
4	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	168.003.300	168.003.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	931.550.180
4	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	10.004.300	10.004.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	214.498.900
4	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	123.003.500	123.003.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	642.478.750
4	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	10.159.200	10.159.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	11.171.160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah								
4	01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1.351.285.000	1.152.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	2.413.664.000
4	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1.975.000.000	1.356.166.135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	2.188.593.000
4	01	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	kualitas pelayanan Umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	56.306.400	56.306.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai keten tuan	95 %	84.754.956
4	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											11.799.072.000	1.799.072.000					8.674.764.560
4	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	95 %	95 %	1.799.072.000	1.799.072.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	95 %	2.190.412.400
4	01	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	95 %	218.790.000
4	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kapasitas Sum ber Daya Aparat tur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	75 Unit	75 Unit	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentu an	95 %	138.837.160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah								
4	01	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparat tur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	6.000.000.000
4	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparat tur	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 bidang	2 bidang	95 %	95 %	10.000.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	0
4	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2.158.588.221	2.158.588.221					2.682.439.840
4	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	950 %	950 %	12 Laporan	12 Laporan	95 %	95 %	117.518.500	117.518.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	950 %	241.259.480
4	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Sumber Daya Listrik dan Telekomunikasi	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	950 %	950 %	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	1.344.968.071	1.344.968.071	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	950 %	1.522.534.500
4	01	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	950 %	950 %	12 Bulan	12 Bulan	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	950 %	152.471.000
4	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	950 %	950 %	5 Laporan	5 Laporan	95 %	95 %	696.101.650	696.101.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	950 %	766.174.860
4	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											487.772.820	1.041.766.770					2.657.348.750

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Pemerintah an Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	255 Unit	255 Unit	95 %	95 %	240.950.000	240.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	95 %	587.510.000
4	01	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	15 Unit	15 Unit	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	95 %	195.538.750
4	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	4 Unit	4 Unit	95 %	95 %	0	553.993.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	95 %	0
4	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	4 Unit	4 Unit	95 %	95 %	246.822.820	246.822.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	95 %	1.849.000.000
4	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Ha	1 Ha	95 %	95 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	95 %	25.300.000
4	01	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											2.010.011.581	1.998.477.444				1.402.772.736
4	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	97 %	97 %	1.776.557.781	1.765.023.644	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.114.847.736

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	12 paket	12 paket	97 %	97 %	109.613.800	109.613.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	139.623.000
4	01	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	2 orang	2 orang	97 %	97 %	123.840.000	123.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	148.302.000
4	01	Administrasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah											2.095.791.100	2.095.791.100				2.782.589.409
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	97 %	97 %	1.224.528.250	1.224.528.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.725.577.409
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	97 %	97 %	748.862.850	748.862.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	911.944.000
4	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	kualitas pelayanan Kepada Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	97 %	97 %	122.400.000	122.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	145.068.000
4	01	penataan Organisasi											535.752.600	535.752.200				1.461.933.530
4	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	3 Dokumen	3 Dokumen	97 %	97 %	194.209.000	194.209.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95 %	160.480.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	97 %	97 %	88.959.800	71.464.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95 %	430.395.570
4	01	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97 %	97 %	99.579.200	81.053.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95 %	269.720.550
4	01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97 %	97 %	98.128.800	146.183.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95 %	431.299.550
4	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97 %	97 %	54.875.800	42.841.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95 %	170.037.560
4	01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											2.468.100.772	2.810.121.672				4.722.311.000
4	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Terselenggara nya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	95 %	95 %	742.932.472	1.086.806.472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	1.932.571.300
4	01	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terselenggara nya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	403.466.300	401.613.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	761.076.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah								
4	01	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terselenggara nya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	12 Laporan	12 Laporan	95 %	95 %	1.321.702.000	1.321.702.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Perencanaan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	95 %	2.028.662.900
4	01	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											36.718.569.744	40.739.659.684					44.842.715.412
4	01	Administrasi Tata Pemerintahan											341.727.500	278.971.940					2.140.854.375
4	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase koordinasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	99.019.900	86.604.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi Pemerintahan	95 %	810.213.525
4	01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase koordinasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	Terlaksananya Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	120.335.300	97.487.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi Pemerintahan	95 %	880.097.680
4	01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase koordinasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Tata pemerintahan yang dilaksanakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	122.372.300	94.879.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koordinasi Pemerintahan	95 %	450.543.170
4	01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											35.496.349.521	38.937.818.021					39.758.530.270
4	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	9 Dokumen	9 Dokumen	95 %	95 %	33.379.913.021	36.853.143.221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	95 %	36.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	2 Dokumen	2 Dokumen	95 %	95 %	2.070.220.500	2.055.708.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	95 %	3.573.725.100
4	01	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kebijakan kesejahteraan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	46.216.000	28.966.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Implementasi Bahan Kebijakan lingkup Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	95 %	184.805.170
4	01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											635.010.800	579.912.100				730.261.000
4	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	100 %	182.330.000	168.432.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	95 %	209.679.000
4	01	Fasilitasi Bantuan Hukum	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	7 Kasus	7 Kasus	100 %	100 %	313.215.500	286.264.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	95 %	360.197.000
4	01	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	139.465.300	125.215.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase produk rancangan produk hukum yang dikaji	95 %	160.385.000
4	01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah											245.481.923	942.957.623				2.213.069.767
4	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terfasilitasinya kerjasama daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 dokumen	1 dokumen	97 %	97 %	121.355.508	103.352.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	95 %	340.335.710

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
														Keuangan				
4	01	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terfasilitasinya kerjasama daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97 %	97 %	28.732.400	765.069.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	95 %	1.658.986.350
4	01	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terfasilitasinya kerjasama daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	97 %	97 %	95.394.015	74.535.615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Kerjasama anatar Pemerintah daerah yang difasilitasi	95 %	213.747.707
4	01	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											2.129.851.800	1.962.488.775				4.637.023.128
4	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											428.520.600	379.590.000				1.183.693.500
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhap perekonmonian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	231.272.100	211.481.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	96 %	334.598.770
4	01	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhap perekonmonian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	137.316.100	111.381.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	96 %	507.402.500
4	01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah terhap perekonmonian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 %	96 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 %	95 %	59.932.400	56.726.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase pengendalian perkembangan usaha BUMD	96 %	341.692.230

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get		
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah								
4	01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											503.607.600	447.937.575				1.220.081.500	
4	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase kualitas pengendalian pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Administrasi Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	267.397.600	267.397.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Persentase kualitas pengendalian pembangunan	95 %	626.326.800
4	01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kualitas pengendalian pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	13 Laporan	13 Laporan	100 %	100 %	177.948.500	122.278.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Persentase kualitas pengendalian pembangunan	95 %	263.754.700
4	01	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kualitas pengendalian pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	Administrasi Pembangunan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	14 Laporan	14 Laporan	100 %	100 %	58.261.500	58.261.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan		Persentase kualitas pengendalian pembangunan	95 %	330.000.000
4	01	Iolaan Pengadaan Barang dan Jasa											541.526.600	541.526.600				1.735.609.500	
4	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang sesuai dengan Perundang-undangan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 95 %	85 % 95 %	5 Laporan	5 Laporan	95 %	95 %	354.769.600	354.769.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	95 %	875.034.600
4	01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan	Jumlah Paket Tender yang dilaksanakan UKPBJ	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 95 %	85 % 95 %	1 Laporan	1 Laporan	95 %	95 %	24.314.000	24.314.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan	95 %	140.601.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Tar get	
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
		Pembangunan Tepat Waktu		Korupsi, Kolusi dan Nepotisma												Pembangunan Tepat Waktu		
4	01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisma	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 % 95 %	85 % 95 %	1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	95 % 95 %	162.443.000	162.443.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu Tingkat Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu	95 %	719.973.300
4	01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										656.197.000	593.434.600					497.638.628
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	97 % 97 %	534.706.200	471.943.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	95 %	239.859.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Tar get
						Se belum	Se sudah	Se belum	Sesudah	Se belum	Se sudah							
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Dokumen	1 Dokumen	97 %	97 %	52.225.600	52.225.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	95 %	118.629.228
4	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	Terevaluasinya kebijakan sumber daya alam	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Doumen	1 Doumen	97 %	97 %	69.265.200	69.265.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Prosentase rumusan bahan kebijakan yang ditindaklanjuti menjadi dokumen kebijakan SDA, bidang perekonomian, ketahanan pangan, dan pertanian, investasi daerah	95 %	139.150.000
Jumlah													97.203.256.089	88.103.315.677				115.570.065.222

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretarita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya :

- a. Dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan pengelolaan Situ Bagendit;
- b. pengalokasian gaji PPPK; dan
- c. penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan;

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN